

**ANALISIS PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PURWOREJO
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Program Studi Ilmu Politik



Oleh :

ALFINA ROSDIANA

NIM. 1806016058

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 5 (lima eksemplar)
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
ditempat

Assaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : ALFINA ROSDIANA
NIM : 1806016058
Jurusan : ILMU POLITIK
Judul Skripsi : Analisis Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2021

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 27 Mei 2022

Pembimbing



H. ADIB, S. Ag., M.Si.

NIP. 197303202002121002

Tanggal :

SKRIPSI

**ANALISIS PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI DESA PURWOREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2021**

Disusun oleh :

ALFINA ROSDIANA

NIM. 1806016058

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi

Pada tanggal 15 Juni 2022 dan dinyatakan **LULUS**

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Dr. Tolkhatul Khoir, M. Ag

NIP. 19770120 200501 1 005

Sekretaris



Masrohatun, M.Si

NIP. 19880621 201801 2 001

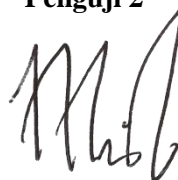
Penguji 1



Drs, Nur Syamsudin, M.Ag

NIP. 19680505 199503 1 002

Penguji 2



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si

NIP. 19840909 201903 1 007

Pembimbing



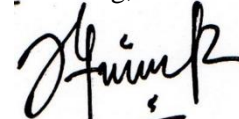
H. Adib, M.Si

NIP. 19730320 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil dari kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2022



Alfina Rosdiana
NIM. 1806016058

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarokatuh

Ahamdulillah wa Syukurulillah atas rahmat dan Karunia-Nya Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ANALISIS PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PURWOREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umatnya yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.Sos) pada jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi orang yang membacanya.

Pada kesempatan ini penulis sangat bersyukur atas selesainya penulisan skripsi ini dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan baik secara materil maupun secara moril.

Dengan ketulusan hati ijinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan kesehatan bagi penulis.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Drs.Nur Syamsudin, M.A, selaku ketua jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
5. H. Adib, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing penulis.
6. Dr. H. Ahwan Fanani, M.Ag., selaku wali dosen penulis.

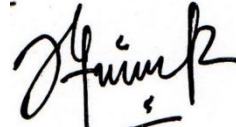
7. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan mengajarkan penulis tentang ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan program studi Sarjana Ilmu Politik.
8. Ahmad Saifullah Al Asadul Usud, selaku Kepala Desa Puworejo yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di Desa Purworejo.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Suhirman, S.Pd. dan Ibu Erma Hirzatul Warotsah yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan do'a yang selalu dipanjatkan.
10. Kakak penulis tercinta Firda Suryaningtyas, S.Pd. dan adik-adik Muhammad Wafa Taftazani, Wildan Affan Nur, Muhammad Nafidz Anwary yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi.
11. Teman karib penulis Ahmad Maliki, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa.
12. Sahabat-sahabat penulis, Siti Jazilatul Rohmah, Anang Kurniawan, Misfaatin Nisa, Sustania Via lintas Sari, Lintang Nurul Fadhilah, dan seluruh kawan kelas politik B angkatan 2018 semuanya, yang telah memberikan dukungan dan ruang untuk saling berbagai informasi.
13. Kawan seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2018 UIN Walisongo Semarang atas jalinan pertemanan dan dukungan pada penulis.
14. Komunitas Pemuda Wedung yang memberi dukungan agar segera menyelesaikan skripsi.
15. Keluarga Korps Komunitas Juang PDI Perjuangan Kabupaten Demak yang selalu memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.
16. Keluarga Senyum Anak Nusantara Chapter Demak yang juga selalu memberikan dukungan dan semangat.
17. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Setelah menyelesaikan skripsi dengan banyak tantangan dan perjuangan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi siapapun yang membacanya. Akhir kata penulis

ucapkan beribu-ribu terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang penulis lakukan kepada pihak terkait.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 15 Juni 2022



Alfina Rosdiana

NIM. 1806016058

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang saya cintai dan sayangi. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Suhirman, S.Pd dan Ibu Erma Hirzatul Warotsah yang telah memberikan segala hal untuk kemajuan hidup saya salah satunya dengan mendapatkan gelar sarjana.

Kepada Kakak tercinta Firda Suryaningtyas, S.Pd dan Adik Muhammad Wafa Taftazani, Wildan Affan Nur, Muhammad Nafidz Anwary yang selalu menggenggam erat tangan untuk memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

*If we have a strong desire from the heart,
then the whole universe will work together to make it happen.*

~ Ir.Suekarno

“Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati,
maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya.”

~ Ir.Suekarno

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang sering terjadi di wilayah pesisir seperti pada Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Kemiskinan menjadi hal biasa yang dirasakan oleh masyarakat, namun hal biasa itulah yang akan memunculkan permasalahan baru. Oleh sebab itu, perlu adanya terobosan-terobosan baru agar masalah kemiskinan dapat terselesaikan dan tidak terus berkembang. Hal yang diperlukan adalah ketegasan Pemerintah dalam menerapkan kebijakan untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Selain itu, wujud dari partisipasi masyarakat dalam mendukung permasalahan ini juga diperlukan. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab masalah tentang apa solusi yang ditawarkan pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk mengungkapkan kondisi yang terjadi dan menganalisis fakta lapangan yang dikaitkan dengan teori. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknis observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan kajian kepustakaan. Analisis yang difokuskan dalam penelitian ini adalah analisis partisipasi publik.

Hasil menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Desa Purworejo dalam menanggulangi kemiskinan termuat dalam kebijakan Peraturan Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa No 9 Tahun 2020. Dari peraturan desa tersebut menghasilkan adanya pemenuhan hak-hak warga miskin oleh pemerintah melalui pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi. Sedangkan hasil dari partisipasi masyarakat Desa Purworejo dalam penanggulangan kemiskinan sebagaimana teori Arnstein termasuk ke dalam kategori kemitraan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi publik dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan diantaranya pendidikan, pekerjaan, pola pikir, dan luas wilayah.

Kata Kunci : Partisipasi, Kebijakan, Kemiskinan.

ABSTRACT

Poverty is a problem that often occurs in coastal areas such as Purworejo Village, Bonang District, Demak Regency. It is a common thing that is felt by the community and this ordinary thing will create new problems. Therefore, breakthroughs are needed so that problem of poverty can be resolved and does not grow in a community. The government's firmness is needed to implement the policies to tackle poverty problems. In addition, community participation in supporting this problem is also needed. This research was intended to answer the problem of what kind of solutions that offered by the government in tackling the problem of poverty in Purworejo Village, Bonang District, Demak Regency. This research was descriptive qualitative research, to reveal the conditions that occur and analyze field facts related to the theory. Data collection in this study used technical field observations, interviews, documentation, and literature review. The analysis focused on in this research was the analysis of public participation.

The results of the study showed that Purworejo Village government's policy about tackling poverty was contained in the Village Regulation policy in the Purworejo Village Medium-Term Development Plan No. 1 of 2017. From the village regulation, the government fulfills the rights of the poor through physical, social, and economic development. While the results of the participation of the people of Purworejo Village in poverty alleviation were very low so the impact has not been well implemented by the village government policies in tackling poverty. From another point of view, the participation ladder from Shery Arnstein's theory, the participation in Purworejo Village was included in the partnership category. Several factors influence public participation in poverty reduction policies, including education, employment, mindset, and area.

Keywords: Participation, Policy, Poverty.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan.....	6
D. Manfaat.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II	17
KERANGKA TEORI	17
A. Partisipasi	17
B. Tingkatan Partisipasi.....	18
C. Partisipasi sebagai Tujuan Pembangunan	20
D. Kebijakan Publik Partisipatif	21
E. Proses Analisis Kebijakan	21
F. Kemiskinan.....	23
G. Faktor Penyebab Kemiskinan	25
H. Penanggulangan Kemiskinan	25
BAB III.....	28

LANDSCAPE DESA PURWOREJO	28
A. Profil Desa Purworejo	28
B. Kondisi Wilayah	33
C. Potensi Desa Purworejo	36
D. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Purworejo	38
E. Kondisi Kemiskinan Desa Purworejo.....	39
BAB IV	41
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DESA PURWOREJO	41
A. Penetapan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.....	41
B. Arah dan Strategi Kebijakan	52
BAB V	Error! Bookmark not defined.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN	54
PENANGGULANAN KEMISKINAN	54
A. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.....	54
B. Tingkatan Partisipasi Masyarakat	69
BAB VI.....	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	78
RIWAYAT HIDUP	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : DTKS Desa Purworejo.....	3
Tabel 2 : Indikator penelitian tingkatan partisipasi.....	14
Tabel 3 : Batas wilayah Desa Purworejo.....	28
Tabel 4 : Dusun Desa Purworejo	29
Tabel 5 : Struktur Pemerintahan Desa Tahun 2016-2022.....	31
Tabel 6 : Stuktur Badan Permusyawaratan Desa Purworejo.....	32
Tabel 7 : Penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan.....	34
Tabel 8 : Lembaga pendidikan di Desa Purworejo.....	34
Tabel 9 : Fasilitas Kesehatan Desa Purworejo.....	35
Tabel 10 : Jenis Pekerjaan masyarakat Desa Purworejo.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta wilayah Desa Purworejo.....	30
Gambar 2 : Kenampakan kondisi jalan.....	34
Gambar 3 : Pasar Penunjang perekonomian.....	35
Gambar 4 : Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa	55
Gambar 5 : Musyawarah tingkat dusun.....	59
Gambar 6 : Pelaksanaan pembangunan	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Permohonan Ijin Penelitian.....	81
Lampiran 2 : Informan Penelitian.....	82
Lampiran 3 : Kuesioner Penelitian	83
Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian.....	98
Lampiran 5: Dokumen RPJMDes	102
Lampiran 6 : Tim penyusun RPJMDes.....	103
Lampiran 7 : Daftar Hadir Masyarakat	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara realita masyarakat merupakan aktor strategis dalam penyelenggaraan pemerintah dan juga berperan dalam menentukan kebijakan. Dimana melalui ide, gagasan, dan pemikirannya dapat mempengaruhi program-program yang akan diberikan oleh pemerintah (Muschlis Hamdi, 2015:160). Program-program yang disusun harus memenuhi kebutuhan kondisi masyarakat, dimana proses perencanaan dalam pengusulan program pembangunan harus terlebih dahulu melakukan analisis sebagaimana kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan analisis kebutuhan harus benar-benar sesuai dengan keadaan fakta yang ada di masyarakat dan tidak hanya sekedar membuat daftar keinginan (*list on want*) yang bersifat sementara melainkan juga merujuk pada *need analisis*, dalam menggali informasi tersebut sesungguhnya hal tersebut membutuhkan masyarakat banyak baik dari tokoh masyarakat, pemerintah, dan masyarakat sendiri. Hal tersebut mengisyaratkan dalam meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki (*participating and belonging together*) kepada program yang akan dijalankan (Zamhariri, 2008:103).

Pembangunan masyarakat di pedesaan pada umumnya didasarkan atas asas sama rata yang implikasinya diarahkan secara sektoral di setiap desa. Meskipun dari setiap dana atau pendapatan pembangunan memiliki nilai yang cukup besar namun jika dibagi di setiap desa, maka masing-masing desa akan mendapatkan nilai yang relatif kecil, sehingga hal ini berdampak pada konsepsi pembangunan yang kurang berhasil dalam memberikan perubahan ke arah yang lebih baik (Adisasmita, 2006:115).

Maraknya kegiatan didalam proses perencanaan pembangunan belum seutuhnya mapu mencapai kesejahteraan negara dan bangsa. Pembangunan dari setiap lini sektor juga belum mewartahi dan mencukupi kebutuhan

masyarakat. Dapat kita amati bahwa hingga saat ini kemiskinan belum bisa dituntaskan dengan baik. Bahkan semakin maraknya pembangunan akan semakin memperpanjang deret kemiskinan di negaranya (Yuliah Masruroh, 2014:72).

Kemiskinan merupakan masalah kronis yang bersifat multidimensional serta memberikan akibat yang serius terhadap kualitas hidup masyarakat, jika tidak adanya solusi yang ditawarkan. Kemiskinan menjadi permasalahan global termasuk pada tingkatan lokal yang masih banyak berada dibawah garis kemiskinan (Sueweno, 1998:1-2).

Masalah kemiskinan ditandai dengan adanya kerentanan masyarakat, ketidakberdayaan, wilayah terpinggirkan, dan adanya ketidakmampuan masyarakat dalam menyampaikan keluhan kesah. Kondisi ini diperparah dengan diabaikannya permasalahan tersebut melalui perbedaan gender, sehingga kemiskinan terus ada dan berkelanjutan tanpa ada kesempatan untuk menyelesaikannya (Hermawati, 2012:145).

Kemiskinan menyebabkan efek hampir sama disemua negara. Kemiskinan yang terus menerus terjadi akan memberikan efek kepada berbagai hal diantaranya (1) Terancamnya kesejahteraan masyarakat, (2) pendidikan diabaikan, (3) hak kesehatan tidak didapatkan, (4) Hilangnya kesempatan kerja, (5) Rendahnya hak atas persamaan hukum, (6) Hilangnya hak atas rasa aman, (7) Hak dalam berpartisipasi akan dimarjinalkan, (8) Hak atas psikis akan binasa, (9) Hak dalam berinovasi akan hilang (10) Kebebasan hidup tersingkirkan (Muttaqien,2006:3).

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Kemiskinan di desa tersebut telah lama menjadi permasalahan yang belum tertuntaskan, pada Tahun 2021 Desa Purworejo adalah desa dengan angka indeks kemiskinan paling tinggi se-Kecamatan Bonang yaitu pada angka 8.666 jiwa dengan jumlah keluarga 2.939 keluarga.

Masalah kemiskinan yang sedang terjadi di Desa Purworejo tersebut perlu adanya langkah tindakan penanganan dan pendekatan secara khusus dalam menanggulangi kemiskinan, sehingga kemiskinan tidak lagi berkelanjutan dan berkembang di Desa Purworejo. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi salah satu instrumen dalam melihat kondisi kemiskinan yang ada di Desa Purworejo. Meskipun kemiskinan bersifat tidak tampak, namun melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial setidaknya dapat mengetahui secara gamblang gambaran kondisi kemiskinan di Desa Purworejo dalam satu kerangka holistik.

No.	Tahun	DTKS	Jumlah Penduduk	Prosentase Kemiskinan
1.	2019	7178 jiwa	9592 jiwa	75 %
2.	2020	7100 jiwa	9572 jiwa	74 %
3.	2021	8666 jiwa	9597 jiwa	90,2 %

Tabel 1 : DTKS Desa Purworejo

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Demak Tahun 2021

Tabel diatas merupakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan memperlihatkan bahwa masih adanya kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data tersebut pada setiap tahunnya jumlah masyarakat yang tidak sejahtera atau masyarakat dalam kategori miskin meningkat. Pada tahun 2021 yaitu 90% termasuk tinggi karena kemiskinan tersebut telah mendominasi hampir seluruh wilayah desa. Sehingga hal itu memperlihatkan bahwa kemiskinan berkelanjutan dapat berpotensi di Desa Purworejo Kecamatan Bonang pada tahun berikutnya.

Berjalannya waktu, permasalahan kemiskinan tersebut membuat masyarakat tidak memiliki kekuatan didalam menghadapi kemiskinan yang selalu beriringan setiap harinya. Di sisi lain, heterogenitas kondisi sosial masyarakat yang kompleks memberikan pengaruh dalam penyelesaian permasalahan, sehingga hal tersebut menambah kesulitan untuk

menyelesaikan segala problematika yang terjadi. Sehingga kemiskinan berkelanjutan menjadi masalah utama yang kemudian dikaitkan dengan multidimensional dalam arah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, untuk meminimalisir berkembangnya masalah maka diperlukan adanya payung hukum yang disesuaikan dengan kondisi yang ada serta peran aktif masyarakat dalam menjalankannya.

Sebagaimana Dalam Al-Qur'an Q.S Al Ra'd ayat 11, yang menjelaskan perlunya umat untuk berperan aktif didalam merubah suatu keadaan menjadi lebih baik. Berikut ayatnya,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝١١

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain dia.”

Sebagaimana makna yang terkandung dalam surat tersebut, bahwa partisipasi adalah nilai penting didalam merubah suatu keadaan yang menjadi lebih baik lagi. Termasuk pada Desa Purworejo yang terus berupaya untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan yang diwujudkan pada tingkat kelayakan hidup masyarakat Desa Purworejo. Meskipun demikian permasalahan kemiskinan masih menjadi perhatian betul pihak pemerintah desa. Mengatasi masalah kemiskinan di Desa Purworejo Kecamatan Bonang, peran pemerintah tidak jauh dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diatur dan dengan strategi yang dibangun.

Kebijakan peraturan desa ini menyeleraskan permasalahan yang terjadi di Desa Purworejo, hal itu yang didorong untuk menjadi payung kebijakan

dalam mengentaskan kemiskinan. Kebijakan yang dibuat ini tidak lepas dari adanya peran masyarakat dalam proses penyelerasan arah kebijakan, dalam hal ini yang dimaksud adalah bahwa kondisi ini membutuhkan inisiasi masyarakat dalam memanfaatkan ruang terbuka untuk menyampaikan rasa ketidaknyamanan pada lingkungan kemiskinan tersebut. Secara khusus, masyarakat Desa Purworejo perlu membangun budaya politik sebagai wujud dari *action participatory*.

Wujud dari penyelesaian permasalahan di Desa Purworejo adalah adanya partisipasi yang kemudian dihubungkan pada implementasi kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan yang telah disepakati dalam kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des). Sehingga kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Secara komprehensif penyelesaian kasus ini sejatinya melibatkan masyarakat, pemerintah, dan kelembagaan kemasyarakatan sehingga ketiganya mampu bersinergi mengupayakan solusi atas praktik permasalahan yang terjadi. Termasuk juga dalam melihat sisi ruang publik atas keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, melihat kapasitas partisipasi masyarakat, melihat dinamika perubahan masyarakat, dan mewujudkan demokratisasi desa yang diimplemetasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nantinya kemiskinan berkelanjutan dapat diantisipasi.

Penelitian ini lebih lanjut mengambil lokasi di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, dimana pada lokasi tersebut merupakan wilayah dengan indeks kemiskinan tinggi se Kecamatan Wedung dan mengalami tingkatan ketidaksejahteraan yang drastis dalam Tahun 2021, sehingga untuk memecahkan masalah tersebut penulis akan melakukan penelitian tentang bagaimana sesungguhnya konsep partisipasi masyarakat yang dibangun dalam penanggulangan kemiskinan, sejauh mana partisipasi ini berperan di Desa Purworejo, problematika apakah yang melatarbelakangi adanya kemiskinan berkelanjutan dan bagaimana kebijakan berperan dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Purworejo,

serta apakah sudah ada implementasi dari kebijakan tersebut di masyarakat. Berdasarkan uraian pada permasalahan yang telah dijelaskan, maka hal ini perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tentang partisipasi publik dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Tahun 2021. Penulis akan melihat tentang bagaimana partisipasi itu dibangun dan apakah terdapat ruang terbuka bagi masyarakat atau tidak dalam mengkritisi dan turut terlibat secara aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya penulis juga akan menilik tingkat keterlibatan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide, gagasan dan pemikiran sampai dengan hasil keputusan. Tidak lain, hal itu akan berkaitan erat dengan nilai positif dalam pembangunan yang partisipatif. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka terdapat dua pertanyaan utama dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana kebijakan yang dibangun dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2021?
- 2) Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Tahun 2021?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
- (2) Untuk mengetahui tingkatan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

D. Manfaat

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun secara praktis sebagai berikut :

(1) Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada permasalahan penanggulangan kemiskinan dan pengetahuan dalam membangun partisipasi masyarakat serta melaraskan hubungan partisipasi pada kebijakan.

(2) Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan melihat pada konteks partisipasi masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan dalam membantu masyarakat untuk mengetahui cara penanggulangan kemiskinan yang baik dan tepat.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk menambah keilmuan dan wawasan pengetahuan serta sebagai bahan diskusi dalam studi yang bersangkutan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai partisipasi publik untuk pembangunan desa sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain, akan tetapi penelitian mengenai partisipasi publik dalam hal kebijakan penanggulangan kemiskinan belum banyak dilakukan. Penelitian ini ada dua variabel yaitu variabel partisipasi dan variabel kebijakan. Penulis melakukan penelusuran kajian pustaka yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut :

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Lilin Apriyani,dkk (2019:64) melalui Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan yang berjudul "*Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah*". Penelitian tersebut mendeskripsikan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hasilnya menjelaskan bahwa masyarakat di Desa Toyareka aktif melaksanakan kegiatan rapat RT yang diselenggarakan setiap satu bulan sekali dengan menggali usulan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat tersebut tercermin dari rutinitas yang dilakukan dalam pembangunan desa dengan tergambar pada setiap tahap yang diikuti baik tahapan penentuan agenda sampai dengan tahapan evaluasi.

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Ibnu Affan (2020:137) melalui Jurnal Ilmu Hukum yang berjudul "*Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*". Fokus penelitian ini mengkaji tentang bagaimana membangun kesadaran partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat mendorong keaktifan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Melalui kemitraan, pemerintah memberikan informasi secara terbuka untuk digunakan sebagai masukan masyarakat kepada pemerintah daerah, sehingga mampu tercipta antusias dalam penyelenggaraan pemerintah, baik tertuju pada individu, kelompok, maupun organisasi.

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Bambang Noorsetya, dkk (2020:8) melalui Jurnal Ilmu Administrasi Negara yang berjudul "*Social Inclusion dan Penguatan Kelembagaan Sosial dalam Otonomi Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan*". Dalam penelitian ini fokus kepada mengkaji tentang penguatan tatanan kelembagaan sosial dengan spirit lokal untuk memerangi kemiskinan. Penelitian ini menjelaskan bahwa membentuk kepedulian dalam tatanan kelembagaan sosial dapat menciptakan kekuatan besar dalam menanggulangi kemiskinan. Termasuk juga dalam hal komunalisme yang mampu memberikan kerekatan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga kerekatan tersebut akan

memunculkan pemikiran yang dapat keluar dari zona miskin baik secara lokal maupun global.

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Josef Papilaya (2020:90) melalui Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan yang berjudul "*Kebijakan Publik dalam Pengentasan Kemiskinan (Suatu Kajian Peranan Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan)*". Penelitian tersebut mengkaji tentang kebijakan dalam pengentasan kemiskinan. Hasilnya menjelaskan bahwa di dalam pengentasan kemiskinan perlu melihat sudut pandang yang tidak hanya dari satu sisi saja, melainkan kepada sudut pandang secara menyeluruh baik dari sisi sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun kepada letak suatu wilayah. Dan pada penelitian tersebut juga menjelaskan bahwasanya didalam menerapkan sebuah kebijakan yang utuh, maka perlu membangun kebijakan yang berdasarkan pada karakteristik suatu daerah tertentu sehingga dengan hal itu maka akan terlihat potret kemiskinan secara nyata.

Penelitian dilakukan oleh Mufid Zuhri dan Arif Sofianto (2020:78) melalui Jurnalnya yang berjudul "*Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah, Indonesia*". Pada penelitian ini mengkaji tentang realisasi program untuk mencegah kemiskinan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa program penanggulangan yang dilakukan masih ditemui hambatan, yang mana hambatan tersebut berupa salah sasaran dan kurang efektifnya pembagian yang dibagikan dengan produktivitas yang ada di masyarakat. Wujud dari realisasi program merujuk pada edukasi masyarakat miskin di dalam membangun mental dan produktivitas dalam merespon program yang diberikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Nadilla (2019:96) melalui Jurnal Hak Asasi Manusia yang berjudul "*Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Kebijakan Publik dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia*". Fokus penelitian adalah mengkaji tentang partisipasi publik. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat kontradiksi antara pemerintah dan masyarakat yang menghambat pelokalan dalam mewujudkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dikarenakan

kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan yang dilihat pemerintah. Sehingga akibatnya pemerintah dalam membentuk suatu kebijakan kurang bisa memayungi permasalahan tersebut. Gagalnya sikap pemerintah berdampak pada partisipasi publik yang bisa dilihat dari aktifnya masyarakat dalam turut serta merumuskan kebijakan.

Penelitian yang akan dilakukan penulis memberikan pembaharuan pada konsep partisipasi. Dengan melihat sejauh mana partisipasi berperan dalam memberikan payung kebijakan dengan memotori problematika kemiskinan di wilayah pesisir yang terus mengalami keberlanjutan. Kemudian akan dianalisis secara detail sesuai dengan teori penelitian.

F. Metode Penelitian

Pembahasan pada penelitian ini menggunakan beberapa bagian yaitu, jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan pengamatan secara langsung. Penelitian lapangan menurut Husaini Usman, dkk (2006:4-5) adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan penulis adalah menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif.

Melalui pendekatan studi kasus, kasus yang diteliti dapat dijelaskan secara rinci dan jelas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan secara akurat keadaan yang ada di lapangan, dengan paradigma lingkaran sosial politik yang didasarkan atas kenyataan empirik sebagaimana yang telah dijelaskan dari permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan menggali informasi, membandingkan, menganalisa, membangun perspektif, eksplorasi mendalam, termasuk dalam hubungan kegiatan komunikasi, serta dalam proses yang sedang berlangsung.

Pada analisisnya penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dengan menggambarkan suatu konsep secara menyeluruh untuk mengetahui implikasi atas validitas, komprehensif, dan interkoneksi dalam praktek-praktek partisipasi masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Upaya yang akan dilakukan dengan pengumpulan data yang apa adanya, menjelaskan dengan narasi kualitatif, membentuk pola yang sistematis, dan mengembangkan generalisasi melalui analisa data.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang akan digunakan penulis terdiri dari dua sumber data yaitu,

a) Data Primer

Pada sumber data primer, data didapatkan melalui studi lapangan dengan melihat langsung kondisi lingkungan penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang akurat penulis menggunakan teknik dokumen dan melakukan wawancara dengan para informan yakni pemerintah desa, masyarakat, pendamping desa dan pihak Pemerintah Kabupaten yang terkait. Adapun fokus penelitian ini berhubungan dengan partisipasi publik berkaitan dengan ruang publik dalam menyampaikan aspirasi secara *bottom-up* dan melihat bagaimana konsep partisipasi yang dibangun masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

b) Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan fokus permasalahan pada skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data, penulis menggunakan 3 teknik yang saling berkesinambungan dalam mengumpulkan data penelitian, diantaranya.

a) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Husaini Usman, dkk 2006:67).

Pada teknik dokumentasi, penulis memanfaatkan data-data berupa lembaran dokumen, notulensi, laporan kinerja pemerintah, dokumentasi foto kegiatan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan data pokok penelitian.

b) Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara dua orang atau lebih. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan yang diwawancarai disebut interviewee (Husaini Usman, dkk 2006:55).

Pada teknik ini menjadi kelebihan bagi penulis untuk mendapatkan data akurat yang berasal dari informan yang bersangkutan secara langsung. Pada proses wawancara terdiri dari pewawancara maupun yang akan diwawancarai dengan merujuk pada komunikasi secara langsung maupun tidak langsung.

Pada teknik wawancara ini penulis akan mengkonfirmasi ulang atas pengumpulan data secara dokumentasi agar mendapatkan informasi secara akurat. Penulis nantinya akan melakukan wawancara mendalam kepada Kepala Desa Purworejo, masyarakat Desa Purworejo, dan pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang memiliki wewenang dalam penelitian terkait. Hal tersebut guna mencari data akurat yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dimana pada konteks wawancara ini, penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait responsivitas seluruh elemen dan mencari kejelasan atas sebab permasalahan yang terjadi.

c) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan atas gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang dicatat secara sistematis dan dapat dikontrol keabsahannya (Husaini

Usman, dkk 2006:52).

Pada teknik observasi, penulis akan terjun lapangan secara langsung bertemu dengan informan maupun melakukan pengamatan secara tidak langsung dengan melalui komunikasi online untuk mendapatkan gambaran partisipasi masyarakat secara fakta dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Tahun 2021. Teknik ini akan lebih tajam dan lebih lengkap dalam mengetahui kondisi dasar masyarakat sejak awal sampai dengan akhir aktivitas penulis melakukan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari informan-informan dan melakukan observasi serta penelusuran dokumen, kemudian akan diolah dan dianalisa secara keseluruhan dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam narasi penelitian kualitatif membutuhkan adanya analisis data, untuk mendapatkan hasil maka diperlukan pedoman sebagai acuan. Sedangkan, pedoman dalam menganalisis data penelitian perlu disajikan indikator atau parameter untuk menentukan tingkat partisipasi sebagaimana teori dari Shery R. Arnsteinn.

No.	Tingkatan Partisipasi	Indikator
1.	Manipulasi	1. Relatif tidak ada komunikasi antara pemerintah dan masyarakat 2. Masyarakat hadir karena terpaksa
2.	Terapi	1. Komunikasi terbangun hanya dari inisiasi pemerintah saja 2. Masyarakat hadir hanya untuk memenuhi undangan
3.	Informasi	1. Terdapat komunikasi namun hanya bersifat satu arah 2. Masyarakat hadir mendapatkan informasi tanpa menyampaikan pendapat

4.	Konsultasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah 2. Masyarakat hadir untuk mendapatkan informasi dan dapat menyampaikan pendapat, namun pendapat tersebut tidak diperhitungkan
5.	Penentraman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menjalin komunikasi dengan pemerintah melalui negosiasi 2. Masyarakat hadir untuk mendapatkan informasi dan dapat menyampaikan pendapat, namun pendapat hanya sebagian yang diperhitungkan
6.	Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat bermitra dengan pemerintah didalam merumuskan sebuah kebijakan 2. Masyarakat mendapatkan tanggung jawab
7.	Pendelegasian Kekuasaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat diberi kewenangan untuk mengurus sendiri didalam memenuhi kepentingannya 2. Masyarakat memiliki inisiasi didalam mengambil peran
8.	Pengawasan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat memiliki kebebasan untuk mengendalikan jaminan pengaturan kebijakan 2. Masyarakat terlibat secara aktif dan mampu membuat keputusan

Tabel 2 : Indikator penelitian tingkatan partisipasi

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2010:246) mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

a. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Data yang didapat dari lapangan jumlahnya cukup banyak, oleh karena itu perlu disesuaikan dengan data yang akan dibutuhkan, semakin lama penulis meneliti dilapangan maka akan semakin banyak pula data yang diperoleh. Untuk itu pada tahapan pertama ini, perlu untuk segera menganalisis data menggunakan reduksi data.

Mereduksi data berarti mengerutkan data yang telah didapat dengan memilih data pokok dan kemudian difokuskan pada hal-hal

penting sesuai dengan tema dan kajian yang diteliti. Dengan melalui reduksi data, mempermudah penulis dalam memilah catatan-catatan lapangan menjadi hal-hal pokok yang disesuaikan dengan relevansi permasalahan penelitian.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Pada tahap ini, penulis menyajikan data dengan kalimat naratif sebagaimana metode yang telah ditentukan. Dengan proses tersebut, dapat memudahkan penulis untuk memahami lingkup permasalahan yang terjadi.

c. Verifikasi Data (*Verification*)

Langkah terakhir adalah verifikasi data, dimana penulis akan menarik kesimpulan dan verifikasi sesuai dengan rumusan permasalahan tentang bagaimana kebijakan yang dibangun dalam menanggulangi kemiskinan dan bagaimana partisipasi publik dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Desa Purworejo Kecamatan Bonang. Dan didukung dengan bukti-bukti akurat dan konsisten sehingga akan mengemukakan kesimpulan yang kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini penulis memberikan gambaran melalui sistematika penulisan skripsi ini yaitu

1. Bagian Pertama

Pada bagian pertama memuat tentang Halaman Judul, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan, Kata Pengantar, Persembahan, Motto, Abstraksi, Daftar Isi, Daftar Gambar, dan Lampiran.

2. Bagian Kedua

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kerangka Teori

Pada bab ini membahas tentang Kerangka Teori, dengan sub bab Partisipasi Publik, Tingkatan Partisipasi, Urgensi Partisipasi, Kebijakan Publik Partisipatif, Kemiskinan, Bentuk-Bentuk Kemiskinan, Penyebab Kemiskinan, dan Penanggulangan Kemiskinan.

Bab III Gambaran Objek Penelitian

Pada bab ini membahas tentang Gambaran Objek penelitian di Desa Purworejo Kecamatan Bonang dengan sub bab Profil Desa, Kondisi Wilayah, Potensi Desa, Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa, Kondisi Kemiskinan Desa, dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa.

Bab IV Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Purworejo

Pada bab ini mengkaji data penelitian tentang Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Purworejo.

Bab V Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Purworejo

Pada bab ini mengkaji data penelitian tentang Partisipasi Publik dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Purworejo.

Bab VI Penutup

Pada bab ini terdiri dari simpulan dan saran tertentu.

3. Bagian Ketiga

Pada bagian ketiga mencakup tentang daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

KERANGKA TEORI

Dalam menganalisis penelitian Partisipasi Publik terhadap kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2021, penulis menggunakan teori dari Shery R Arnstein (1969) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *A Ladder of Citizen Participation*.

A. Partisipasi

Partisipasi menurut Sherry (1969:1) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah partisipasi yang didasarkan atas kekuatan masyarakat dalam menentukan hasil proses. Partisipasi warga negara adalah istilah kategoris untuk kekuasaan warga negara. Ini adalah redistribusi kekuasaan yang memungkinkan warga negara yang tidak memiliki, yang saat ini dikecualikan dari proses politik dan ekonomi, untuk secara sengaja dimasukkan di masa depan. Ini adalah strategi dimana si miskin bergabung dalam menentukan bagaimana informasi dibagikan, tujuan, dan kebijakan ditetapkan, sumber daya pajak dialokasikan, program dioperasikan, dan manfaat seperti kontrak dan patronase dibagikan. Singkatnya ini adalah sarana dengannya mereka dapat mendorong reformasi sosial yang signifikan yang memungkinkan mereka untuk berbagi manfaat dari masyarakat yang makmur.

Partisipasi masyarakat mutlak sangat penting dalam memberikan peranan bagi pembangunan. Sebagai pemegang kedaulatan, masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam ikut andil melaksanakan penyelenggaraan pemerintah. Adanya status tersebut menjadikan konsep partisipasi harus mampu memberikan sumbangsih atau kontribusi secara aktif sehingga menghasilkan *impact* kedalam tata kelola pembangunan yang berkualitas sebagaimana dalihnya kualitas partisipasi. Dalam penguatan kelembagaan partisipasi, dilihat dari dua arah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian sistem komunikasi dua arah tersebut akan

mendorong suatu aksi nyata terhadap kepuasan masyarakat atas terbukanya ruang publik dalam memperoleh informasi dan menyampaikan kerangka evaluasi. Maka dari itu partisipasi masyarakat perlu diperluas dan diperkuat dalam mendorong pembangunan daerah.

B. Tingkatan Partisipasi

Partisipasi masyarakat dan keterlibatan umum yang layak ditawarkan dalam tiga program sosial yaitu pembaharuan, anti-kemiskinan, dan model kota. Menurut teori Sherry R. Arnstein dalam jurnalnya, tipologi yang di desain mengenai partisipasi ini disusun dalam tangganya sesuai dengan tingkat kekuasaan masyarakat dalam menentukan rencana atau program ide.

Tingkatan partisipasi ini menyandingkan masyarakat yang tidak berdaya dengan kekuasaan yang menyoroti pembagian mendasar antara mereka. Setiap kelompok atau komunitas mencakup sejumlah sudut pandang yang berbeda, perpecahan yang signifikan, kepentingan pribadi yang bersaing, dan sekelompok orang yang terpecah. Pemahaman dalam teori tersebut adalah masyarakat miskin menganggap bahwa yang kuat sebagai “sistem” monolitik dan pemegang kekuasaan memandang bahwa masyarakat miskin hanya sebagai lautan dengan sedikit pemahaman.

Adapun tingkatan anak tangga dalam konteks kekuasaan dibagi menjadi 8 yaitu

1. Manipulasi (*Manipulation*)

Anak tangga terakhir pada tingkatan partisipasi adalah manipulasi, bentuk partisipasi pada taha menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dijadikan sebagai pembaharuan dalam pemenuhan hak-hak manipulasi program. Sehingga kedatangan masyarakat hanya untuk hadir tanpa adanya komunikasi yang interaktif dan pemahaman dalam pertemuan tersebut.

2. Terapi (*Teraphy*)

Tingkatan kedua dari *non-participation* adalah terapi, pada konteks ini adalah masyarakat mendapatkan terapi atas ketidakberdayaan didalam menyelesaikan permasalahan. Sehingga dalam

penyelesaiannya dilakukan dalam forum musyawarah, namun masyarakat hanya mendapatkan arahan dari pemangku kekuasaan dan masyarakat juga dialihfungsikan sebagai kendaraan untuk mempromosikan hasil musyawarah.

3. Pemberian Informasi (*Informing*)

Pada tingkatan ini *adalah tokenism* – informasi partisipasi masyarakat diwujudkan dalam satu arah komunikasi dari pemegang kekuasaan ke warga tanpa adanya hubungan timbal balik dan negosiasi dalam komunikasi tersebut. Informasi yang dimaksud adalah bahwa para pemegang kekuasaan hanya menyediakan informasi yang dangkal, pertanyaan yang diluar bahasan, dan jawaban yang tidak relevan.

4. Konsultasi (*Consultation*)

Partisipasi pada tingkatan ini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan atas ide dan pemikiran masyarakat yang telah dituangkan dalam komunikasi dua arah antara pemegang kekuasaan dan masyarakat. sehingga partisipasi dari masyarakat dalam menyampaikan pendapat tidak diperhitungkan. Metode ini hanya diukur dengan seberapa banyak orang yang datang ke perkumpulan. Namun secara substansinya masyarakat hanyalah berpartisipasi dalam partisipasi.

5. Penentruman (*Placation*)

Tingkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat telah sukarela dalam berpartisipasi dan telah menyampaikan pendapat, masukan dan saran secara terbuka. Namun pada praktiknya elit kekuasaan menggunakan praktik tokenisme untuk mencegah kritik dan masukan dari masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa masyarakat tidak memiliki dampak yang signifikan dalam perencanaan komprehensif yang sedang berlangsung.

6. Kemitraan (*Partnership*)

Kemitraan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kekuatan didalam bernegosiasi dengan para pemegang kekuasaan dalam merumuskan sebuah kebijakan. Masyarakat dapat bekerja sama dalam

perencanaan dan pengambilan keputusan melalui struktur tim penyusun kebijakan untuk menyelesaikan akar permasalahan yang terjadi.

7. Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*)

Pada pendelegasian kekuasaan ini, masyarakat memiliki inisiasi penuh dalam mengambil peran untuk menentukan responsibilitas program-program yang akan dijalankan dengan bantuan pihak terkait. Masyarakat memiliki kedudukan yang jelas dan peluang kursi untuk mendominasi rencana dalam penentuan program tertentu. Pemegang kekuasaan melakukan untuk mengawali proses tawar-menawar dari pada memberikan respon pada pihak lain yang menekan.

8. Pengawasan Masyarakat (*Citizen control*)

Pada tingkat paling tinggi, partisipasi diwujudkan masyarakat dalam mengendalikan segala tuntutan atas jaminan pengaturan program dan memiliki kekuatan secara penuh dalam aspek kebijakan. Hal ini dapat meningkatkan pengawasan masyarakat di berbagai sektor dan memungkinkan masyarakat untuk memberikan perubahan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

C. Partisipasi sebagai Tujuan Pembangunan

Partisipasi secara utuh melibatkan elemen masyarakat dan birokrasi pemerintahan, oleh karena itu pembangunan yang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Keterlibatan masyarakat akan membentuk kewarganegaraan yang dapat mengembangkan sebuah demokrasi dengan konsepsi persamaan dan kebebasan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, urgensi partisipasi menunjukkan adanya kewenangan yang secara hierarki dapat menciptakan demokratisasi.

Kaitan partisipasi dalam pembangunan menurut (Soetrisno (1995 : 208) dalam bukunya Mulyadi (2019:89) Pertama, di dalam sebuah pembangunan partisipasi rakyat adalah wujud dalam membangun kerja sama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Kerja sama tersebut dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan pembangunan. Kedua, didalam

memajukan dan mewujudkan kelembagaan partisipasi rakyat, maka perlu adanya penciptaan dari suatu peralihan pandangan pemerintah terhadap proyeksi pembangunan. Pembangunan adalah implikasi dari kewajiban dan hak moral setiap orang terhadap bangsa. Ketiga, di dalam menumbuhkan partisipasi, diperlukan juga adanya sebuah toleransi dari birokrasi terhadap kritikan rakyat, pasalnya kritikan tersebut adalah salah satu bukti dalam merespon pembangunan.

D. Kebijakan Publik Partisipatif

Kebijakan publik partisipatif adalah kebijakan yang secara substansinya dilakukan untuk kemanfaatan orang banyak. Kebijakan dibentuk didalam prosesnya perlu untuk melibatkan semua orang secara berkesinambungan dan proporsional. Perbandingannya adalah semakin tinggi tingkat partisipasi maka semakin tinggi juga peluang masyarakat dalam mendapatkan program dari pemerintah sehingga hal ini memberikan kebermanfaatan.

Disisi lain, kebijakan publik yang partisipatif menjadi cerminan atas integritas dan komitmen dalam membangun komunikasi. Efektivitas akan tercipta manakala antara pemerintah dan masyarakat sama-sama memiliki kemauan, kemampuan, dan kesadaran di dalam meningkatkan pembangunan yang berbasis partisipasi. Oleh karena itu terbangunnya suatu sistem yang baik dilandasi atas terbangunnya kekuatan negara dan kekuatan masyarakat secara bersamaan (Muchlis Hamdi,2015:148).

E. Proses Analisis Kebijakan

Dalam proses menganalisis kebijakan pada dasarnya adalah mencari solusi bagi pemecahan masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Sebagai sebuah proses, analisis kebijakan memiliki 3 langkah utama dan kemudian dilanjutkan dengan membuat makalah kebijakan, 3 langkah utama yaitu sebagai berikut.

1. Perumusan Masalah Kebijakan

Perumusan masalah kebijakan adalah proses untuk mendeskripsikan suatu keadaan sebagai keadaan yang tidak nyaman dan perlu untuk mencari jalan solusinya. Salah satu hal penting pada langkah ini adalah bahwa perlu kecermatan dan ketepatan untuk menghindari kesalahan dalam mengambil permasalahan. Maka dibutuhkan keseriusan untuk mendalami masalah ini serta memilih untuk siapa kebijakan ini dibuat.

2. Perumusan Alternatif Kebijakan

Hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan alternatif kebijakan menurut Dunn dalam bukunya Muchlis Hamdi adalah dengan mencakup pada *goals*, anggaran, hambatan, dampak, waktu, risiko.

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan

Menurut Patton dan Sawicki (1986:156-166) pertimbangan dalam memberikan alternatif adalah dengan melihat pada kelayakan teknis (*technical feasibility*), kemungkinan ekonomi (*economic possibility*), kelayakan politik (*political viability*), dan keterlaksanaan administratif (*administrative operability*).

Ketepatan dan kelayakan akan suatu kebijakan publik sangat relevan dengan suatu sistem yang bernilai. Di Indonesia, misalnya dengan merujuk pada nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila sehingga semakin membawa bangsa Indonesia menuju bangsa yang adil dan makmur. Oleh karena itu, fungsi kebijakan yang tepat adalah dengan mengimplementasikan nilai bangsa dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Penyusunan Makalah Kebijakan

Penyusunan makalah kebijakan pada dasarnya adalah catatan yang ditulis untuk meyakinkan para pembuat kebijakan mengenai permasalahan kebijakan yang sedang dihadapi dan kemudian diikuti

preferensi dalam memecahkan masalah dengan melalui opsi yang telah disepakati.

F. Kemiskinan

Kemiskinan adalah permasalahan yang krusial tentang taraf hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling bertautan antara satu dengan lainnya yang mana aspek tersebut terdiri dari tingkat pendapatan, tingkat produktivitas, kesehatan, pendidikan, akses pelayanan, lokasi daerah, gender, dan lokasi pemukiman (Sukmaraga 2011:2).

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik didalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan tersebut kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari disisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori per kapita per hari.

Menurut World Bank kemiskinan merupakan kekurangan dalam kesejahteraan yang terdiri dari banyak dimensi diantaranya meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, serta kesempatan hidup yang lebih baik lagi. Bank dunia juga mendefinisikan kemiskinan ekstrem dalam standar ukuran kemiskinan yakni dengan pengeluaran penduduk dibawah 1,90 dollar per hari (*World Bank*).

Dalam mengklasifikasi tingkatan kemiskinan menurut (Sayogja dalam Suyanto,2013:4) sebagai berikut :

- a. Untuk daerah perkotaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras kurang dari 420 kilogram per tahunnya.
- b. Untuk daerah pedesaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras 320 kg, miskin sekali apabila mengkonsumsi 240 kilogram, dan paling miskin dengan mengkonsumsi kurang dari 180 kilogram.

Adapun konsep kemiskinan dalam pendapat Ragnar (1953) dalam (Kuncoro, 2000) dibagi menjadi berikut ini :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan yang dimaksud adalah bahwa setiap individu atau kelompok memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan sehingga tidak dapat mencukupi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ukuran dalam kemiskinan absolut ini bertujuan untuk menentukan tingkat pendapatan masyarakat yang dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif ditunjukkan apabila masyarakat pada dasarnya kebutuhan hidupnya telah terpenuhi. Akan tetapi masih berada dalam skala yang jauh dibandingkan dengan kondisi masyarakat sekiranya. Ukuran ini memperlihatkan kemiskinan bersifat dinamis yang dapat memberikan transformasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga garis kemiskinan dapat menjauh dari masyarakat.

3. Kemiskinan Kultural

Pada bentuk ini merujuk pada ukuran kemiskinan yang mana masyarakat tidak mau berikhtiar dalam memperbaiki tatanan kehidupan. Termasuk juga dalam bentuk ini miskin itu disebabkan

oleh perilakunya masyarakat sendiri yang tidak mau bahkan tidak ada usaha dalam mencari peluang untuk memperbaiki keadaan yang lebih baik lagi.

G. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Badan Pembangunan Nasional (2018:14) mengidentifikasi faktor penyebab kemiskinan yang ada di pedesaan dengan wilayah kemiskinan yang tinggi, disebabkan oleh :

1. Faktor kondisi alam dan lingkungan, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan, formulasi distribusi yang tidak merata, dan bencana alam yang sering terjadi di wilayah tersebut.
2. Faktor penduduk, tingginya angka pertumbuhan penduduk sehingga berdampak pada penekanan sumber daya alam.
3. Faktor kelembagaan dan struktural, adanya kebijakan yang tidak tepat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
4. Faktor eksploitasi yang terjadi antar wilayah, antar kelas, antarkelompok, antar negara sehingga tidak adanya keseimbangan antara daerah yang maju dan daerah berkembang.
5. Faktor teknologi, meningkatkan produktivitas belum diiringi dengan keseimbangan teknologi.

H. Penanggulangan Kemiskinan

Sejauh ini pemerintah melakukan cara untuk mengurangi angka kemiskinan dengan membuat infrastruktur untuk penunjang aktivitas masyarakat dalam memenuhi kehidupan secara layak. Dengan menetapkan prioritas pembangunan sebagai basis dalam penanggulangan kemiskinan.

Namun nampaknya permasalahan kemiskinan semakin meningkat. Meskipun pembangunan demi pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Pada musimnya kondisi lingkungan seperti pada banjir air rob yang meluap akan menggenangi daerah pemukiman dan berpotensi dapat merusak infrastruktur telah dibangun. Meskipun telah dilakukan pembangunan

infrastruktur untuk mengendalikan air tersebut, namun hal tersebut akan rusak kembali. Bencana alam wabah covid-19 juga melatarbelakangi adanya peningkatan kemiskinan.

Dalam penanggulangan kemiskinan disampaikan oleh Prawoto (2009:66) menjelaskan strategi yang perlu dibangun didalam mengurangi angka kemiskinan adalah

1. Memberikan ruang bagi masyarakat miskin untuk ikut serta berpartisipasi didalam proses perencanaan pembangunan.
2. Penuntasan masalah kemiskinan yang bersifat multidimensional, maka dalam penanggulangannya tidak hanya merujuk dalam satu bidang saja melainkan juga memerlukan pendekatan dalam berbagai bidang lainnya.
3. Memberikan kebijakan yang bersifat melindungi kelompok-kelompok miskin. Dimana kelompok miskin tersebut masih rentan terhadap permasalahan internal maupun eksternal, karena masyarakat tidak memiliki jaminan yang melindunginya.
4. Memberikan kebijakan dengan melalui program-program yang dapat memutus rantai penyebaran kemiskinan. Karena pada dasarnya kemiskinan sering kali diakibatkan oleh pola perilaku masyarakat sebelumnya yang kemudian mewarisi generasi selanjutnya.
5. Memberikan penguatan otonomi desa sehingga masyarakat dapat mandiri dalam menanggulangi kemiskinan.

BAB III

LANDSCAPE DESA PURWOREJO

A. Profil Desa Purworejo

1. Potret Desa

Desa Purworejo adalah desa kolonisasi yang datang dari beberapa daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Desa Purworejo menjadi salah satu desa yang produktif dalam penghasil ikan, letaknya yang berada di pesisir pantai, Desa Purworejo menjadi salah satu desa yang memiliki potensi unggulan untuk dikembangkan. Namun, disisi lain Desa Purworejo menjadi salah satu dari 21 desa di Kecamatan Bonang yang termasuk desa dengan angka kemiskinan paling tinggi se-Kecamatan Bonang pada tahun 2021.

Adapun batas wilayah Desa Purworejo adalah sebagai berikut :

No.	Batasan Wilayah Desa	
1.	Sebelah Utara	Desa Betahwalang
2.	Sebelah Selatan	Desa Margolinduk
3.	Sebelah Barat	Laut Jawa
4.	Sebelah Timur	Desa Tridonorejo

Tabel 3 : Batas wilayah Desa Purworejo

Dengan tata letak perbatasan desa yang seperti diatas, menjadikan Desa Purworejo tergabung ke dalam sebutan *tri desa* yang terkenal akan wilayah pesisir dan produktivitas sektor kelautannya. Adapun kondisi monografi Desa Purworejo yaitu jumlah rumah tangga 2345 KK, dengan rincian jumlah penduduk yang terdiri dari jumlah laki-laki 4888 jiwa dan jumlah perempuan 4710 jiwa dengan total keseluruhan penduduk 9597 jiwa. Jumlah RT 67, RW 7 serta terdapat 7 dusun.

Adapun pembagian dusun di Desa Purworejo sebagai berikut :

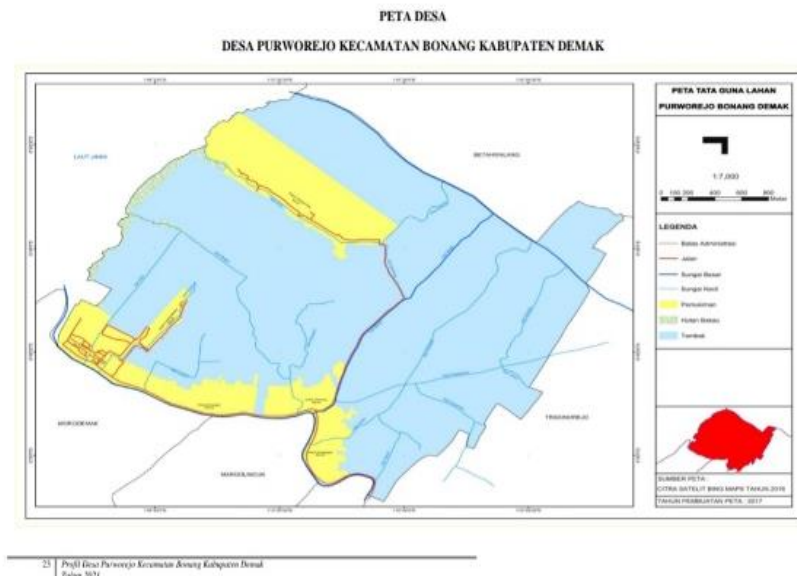
No.	Pembagian wilayah/dusun		
1.	RW 1	Dukuh Pongangan	10 RT
2.	RW 2	Dukuh Gandong	10 RT
3.	RW 3	Dukuh Surungan	13 RT
4.	RW 4	Dukuh Kongsi	10 RT
5.	RW 5	Dukuh Lapangan Kongsi	9 RT
6.	RW 6	Dukuh Tambak Malang	6 RT
7.	RW 7	Dukuh Tambak Polo	9 RT

Tabel 4 : Dusun Desa Purworejo

Desa Purworejo termasuk desa dengan padat penduduk. Sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah rawa pesisir dan pertanian tambak serta selebihnya wilayah pemukiman. Tanah di Desa Purworejo juga nampak gersang sehingga tidak banyak tanaman hijau di daerah tersebut, hanya ada jenis tanaman bakau sebagai pelindung dari hempasan ombak agar tidak mengakibatkan abrasi.

Secara geografis Desa Purworejo memiliki jarak orbitrase dengan pusat pemerintahan sebagai berikut

- a. Jarak Desa ke Kecamatan Bonang adalah 4 km.
- b. Jarak Desa ke Kabupaten Demak adalah 15 km.
- c. Jarak Desa ke Provinsi Jawa Tengah adalah 40 km.
- d. Jarak Desa ke Ibu Kota Negara adalah 750 km.



Gambar 1 : Peta wilayah Desa Purworejo

Diatas merupakan peta wilayah Desa Purworejo Kecamatan Bonang. Secara topografi luas wilayah Desa Purworejo tersebut adalah 741,48 Ha dengan prosentase 8,91% dari luas wilayah di Kecamatan Bonang. Dengan rincian luas tanah sawah tadah hujan 251,98 Ha, luas pekarangan 46,05 Ha, luas tambak 375,73 Ha, dan lainnya berupa pemukiman, jalan sungai seluas 67,72 Ha.

2. Visi dan Misi Desa

Adapun visi dan misi Desa Purworejo adalah sebagai berikut :

1. Visi Desa

“Melayani Masyarakat Desa Purworejo Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Desa Purworejo yang Maju, Mandiri, Sehat, dan Sejahtera”.

2. Misi Desa

- a. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
- b. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.

- c. Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Purworejo.
- e. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Purworejo dengan melibatkan secara langsung masyarakat Desa Purworejo dalam berbagai bentuk kegiatan.
- g. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik, dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Lembaga Pemerintahan Desa Purworejo

a. Struktur Pemerintahan Desa Purworejo

Pemerintah Desa memiliki kewenangan didalam mengatur dan mengurus desanya, Hal ini diamanatkan sebagaimana yang tertera didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berikut struktur Pemerintahan Desa di Desa Purworejo.

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Ahmad Saifullah Al Asadul Usud
2.	Sekretaris Desa	Mundir Adrianto, SE
3.	Kaur Keuangan	Nur Hamid
4.	Kaur Perencanaan	Adis Rohmatullah
5.	Kaur Pelayanan	Saekhun
6.	Kaur Kesejahteraan	M. Ali Hafidz
7.	Kaur Tata Usaha dan Umum	Muhammad Slamet
8.	Kaur Pemerintahan	-

Tabel 5 : Struktur Pemerintahan Desa Tahun 2016-2022.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 merupakan lembaga pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat yang dipilih atas keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun struktur Badan Pemerintah Desa di Desa Purworejo Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Ahmad Sabit, S.Pdi
2.	Wakil Ketua	Abdul Latif
3.	Sekretaris	Nasuha S.H
4.	Anggota	Ajimuska
5.	Anggota	Indah Purwanti
6.	Anggota	Nila Wardana
7.	Anggota	Abdul Jabar
8.	Anggota	Ali Yabidin
9.	Anggota	Ubaidillah

Tabel 6 : Stuktur Badan Permusyawaratan Desa Purworejo

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa Purworejo

Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wujud dari *action participatory* sebagaimana kebutuhan dari masyarakat dengan bermitra pada pemerintah didalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat.

Adapun jumlah lembaga kemasyarakatan di Desa Purworejo adalah sebagai berikut :

No.	Nama Lembaga	Jumlah Lembaga
1.	LKMD	1 Kelompok
2.	PKK	1 Kelompok
3.	Posyandu	7 Kelompok
4.	Pengajian	10 Kelompok

5.	Arisan	15 Kelompok
6.	Simpan Pinjam	15 Kelompok
7.	Kelompok Tani	12 Kelompok
8.	Gapoktan	1 Kelompok
9.	Karang Taruna	1 Kelompok
10.	Ormas/LSM	1 Kelompok

Tabel 6 : Lembaga Kemasyarakatan Desa Purworejo

B. Kondisi Wilayah

1. Sarana Prasarana Umum

Sebagaimana yang telah terurai pada profil desa diatas bahwa Desa Purworejo merupakan wilayah pesisir. Hal ini tentu mengundang konsekuensi untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam membantu aktivitas masyarakat untuk melangsungkan kehidupan yang lebih baik, sarana dan prasarana tersebut meliputi yaitu sarana pendidikan, prasarana akses jalan, sarana penunjang perekonomian, kesehatan, dan usaha/industri.

a. Sarana Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, masyarakat di Desa Purworejo masih termasuk dalam kategori rendah akan kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat didalam membudayakan serta membangun perspektif akan pentingnya pendidikan. Tidak lain, permasalahan tersebut dicatabelakangi oleh tuntutan ekonomi keluarga dan berpotensi tingginya angka putus sekolah.

No.	Jenis pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum sekolah	475 orang
2.	Belum tamat SD	555 orang
3.	Tidak tamat SD	291 orang
4.	SD/Sederajat	2624 orang
5.	STP/Sederajat	1397 orang

6.	SLTA/Sederajat	560 orang
7.	Akademi/PT	115 orang

Tabel 7 : Penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan

Berikut kemudahan Desa Purworejo dalam mencapai sarana pendidikan adalah sebagai berikut :

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	1 buah
2.	TK/RA	10 buah
3.	SD/MI	6 buah
4.	SMP/MTs	2 buah
5.	SMA/Aliyah	1 buah

Tabel 8 : Lembaga pendidikan di Desa Purworejo

b. Prasarana Jalan

Prasarana jalan merupakan hal krusial dalam mendukung segala aktivitas warga, namun hal ini kurang bisa ditemui di Desa Purworejo. Kondisi jalan yang menjadi langganan banjir rob setiap tahunnya bahkan setiap harinya sangat mengganggu aktivitas warga. Bahkan ketika sudah mulai siang air rob akan pasang, kondisi tersebut terjadi di jalan raya dan jalan kampung.



Gambar 3 : Kenampakan kondisi jalan

c. Sarana Kesehatan

Dalam menunjang kesehatan masyarakat, Desa Purworejo memiliki fasilitas kesehatan yang cukup memadai. Kesehatan adalah hal penting didalam kehidupan. Fasilitas kesehatan di Desa Purworejo terdiri dari sebagai berikut :

No.	Fasilitas Kesehatan	
1.	Polindes	1 buah
2.	Bidan Desa	2 buah
3.	Perawat/Mantri	7 buah
4.	Dokter Praktek	1 buah
5.	Pos Pelayanan Terpadu	7 buah

Tabel 9 : Fasilitas Kesehatan

d. Prasarana Penunjang Perekonomian

Dalam menanggulangi kemiskinan, sarana penunjang perekonomian adalah tonggak awal dalam membangun pertumbuhan ekonomi. Pengendalian kemiskinan yang dapat dihentikan dengan program pengadaan prasarana yang memadai. Prasarana penunjang perekonomian yang ada di Desa Purworejo seperti adanya pasar tradisional, pasar tempat pelelangan ikan warung/kios dan sebagainya. Hal ini diarahkan pada kemandirian ekonomi masyarakat desa.



Gambar 4 : Pasar Penunjang perekonomian

e. Usaha/Industri

Mayoritas pencaharian masyarakat Desa Purworejo yang sebagai nelayan menunjukkan bahwa secara umum usaha atau industri yang dibangun berasal dari sektor kelautan dan perikanan seperti pembuatan usaha kerupuk dari ikan, ikan asin (*gereh*), pembuatan bakso dari ikan, dan lain sebagainya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula sektor industri yang masih beraktivitas yaitu meuble kapal, pembuatan jilbab, dan lain sebagainya. Sehingga usaha atau industri yang ada di Desa Purworejo mempunyai peran dalam menunjang pendapatan ekonomi rumah tangga.

C. Potensi Desa Purworejo

Potensi Desa Purworejo dilihat dari berbagai sektor yang ada diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Sektor perikanan dan kelautan

Pada sektor ini, Desa Purworejo memiliki potensi terhadap komoditas laut yang sangat besar yaitu pada tangkapan berbagai macam ikan dan udang. Keberadaan komoditi tersebut dalam sektor perikanan dan kelautan di wilayah Desa Purworejo Kecamatan Bonang menjadi potensi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hasil laut ini menjadi andalan bagi masyarakat Desa sebagai hasil

laut yang bisa diunggulkan, bahkan di Desa Purworejo membangun komoditi Kampung Udang Lokal Nasional. Namun disisi lain, peralihan fungsi lahan menjadi tambak belum dimanfaatkan secara maksimal.

b. Sektor Industri

Keberadaan sektor industri di Desa Purworejo berupa industri rumahan (*home industry*) yaitu industri dari produk yang berasal dari hasil laut seperti dibuat kerupuk, ikan asin (*gereh*). Industri rumahan ini menjadi produk unggulan di Desa Purworejo sendiri. Pasalnya di Desa Purworejo mendominasi produk rumahan tersebut, bahkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sarana untuk penjualan didalam menjual produk olahan ikan. Produk ini tidak kalah saing dengan produk luar wilayah. Dan pada sektor industri ini berpotensi menjadi produk unggulan di Desa Purworejo Kecamatan Bonang. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah desa dalam membentuk program-program pemberdayaan bagi masyarakat, yang kemudian mampu mengembangkan usaha yang berasal dari industri rumahan. Namun laba dari buruh industri rumahan ini sangat kecil hanya Rp. 10.000,- per hari, berbeda dengan industri rumahan yang memiliki jangkauan luas untuk dikembangkan.

c. Pasar Kongsi atau Tempat Pelelangan Ikan

Keberadaan pasar kongsi di Desa Purworejo memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Bonang melalui bantuan Pemerintah Daerah. Bahkan kongsi atau TPI ini menjadi pusat terbesar kegiatan memproduksi dan memasarkannya produk aut kembali. Oleh karena itu, kualitas dari pasar ini menjadi pengembangan ekonomi dalam membumikan hasil tangkapan ikan baik pada skala lokal, nasional, maupun global.

D. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Purworejo

Wilayah Desa Purworejo yang berbatasan dengan laut Jawa, mayoritas bermatapencarian bekerja sebagai nelayan, sehingga pemenuhan ekonomi masyarakat bergantung pada hasil tangkapan ikan. Dari segi pendapatan yang didapatkan dengan jenis pekerjaan sebagai nelayan, kondisi ekonominya dikategorikan dalam ekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada salah satu seorang nelayan Desa Purworejo adalah bahwa ketidakpastian pendapatan diakibatkan oleh kondisi alam, dimana pasang surut air laut mempengaruhi aktivitas nelayan, sehingga hal ini berdampak pada pendapatan.

Pada umumnya jika kondisi alam sedang baik dan mendapatkan jumlah ikan yang banyak maka hasil pendapatan bisa mencapai Rp 100.000 per hari bahkan lebih, namun disisi lain pola hidup konsumtif yang dimiliki para pekerja nelayan ini menunjukkan gaya hidup yang boros. Jika kondisi sedang pasang dan terdapat gelombang air laut yang tinggi maka hasil pendapatan akan menurun drastis bahkan tidak mendapatkan pendapatan. Kondisi yang diperparah dengan kondisi pasang air laut yang berkepanjangan berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat.

Adapun pekerjaan masyarakat Desa Purworejo adalah sebagai berikut

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani sendiri	439 orang
2.	Buruh tani	191 orang
3.	Nelayan	3218 orang
4.	Pengusaha	203 orang
5.	Buruh industri	252 orang
6.	Buruh bangunan	119 orang
7.	Pedagang	220 orang
8.	Angkutan	78 orang
9.	PNS/TNI/Kepolisian	71 orang

10.	Pensiunan	19 orang
11	Lainnya	3208 orang

Tabel 10 : Jenis Pekerjaan masyarakat Desa Purworejo

Selain melihat jenis pekerjaan sebagai saah satu peluang penuntasan kemiskinan. Disisi lain kondisi ekonomi di Desa Purworejo dilumpuhkan dengan keadaan yang tak terduga misalnya pada bencana banjir rob di Desa Purworejo yang dapat melumpuhkan aktivitas masyarakat di dalam mencari pendapatan. Termasuk juga pada tahun 2021 munculnya wabah virus *Coronavirus Disease (Covid-19)* juga melumpuhkan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Purworejo. Faktor-faktor tersebut tentu memiliki efek besar pada kondisi ekonomi masyarakat di Desa Purworejo. Bagi rumah tangga yang rentan, akan merujuk pada meningkatnya angka kemiskinan. Dimana pada akhirnya masyarakat akan mengorbankan salah satu aspek penting kehidupan yang digunakan sebagai kelangsungan mempertahankan kehidupannya. Baik itu mengorbankan aspek pendidikan yang tidak dituntaskan, aspek kesehatan yang dikesampingkan dan hal lainnya.

E. Kondisi Kemiskinan Desa Purworejo

Kemiskinan di Desa Purworejo dianggap biasa oleh masyarakat lokal, dimana hal tersebut telah mengalami habituasi dengan karakteristik wilayah pesisir. Kondisi ini dipengaruhi oleh sifat sosial dengan ketergantungan masyarakat terhadap kondisi wilayah. Kemudian kemiskinan juga diakibatkan oleh pembangunan di pedesaan peminggiran yang masih rendah sehingga sarana dan prasarananya belum memadai apalagi di Desa Purworejo memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Selain itu kemiskinan konsekuensial juga dipandang sebagai salah satu faktor yang memiliki kekuatan besar didalam mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu adanya bencana wabah covid-19 yang secara tidak langsung menjebak masyarakat untuk hidup miskin. Pasalnya kemanjaan kondisi tersebut membentuk watak malas masyarakat untuk hidup secara pragmatis dengan memanfaatkan uluran tangan dari pemerintah.

Kondisi kemiskinan di Desa Purworejo dibuktikan dengan pendapatan per kapita masyarakat yang hanya Rp. 100.000 perhari dalam kondisi yang mendukung, namun jika kondisi sedang tidak mendukung maka pendapatan yang didapatkan hanya dari pekerjaan sampingan sebagai buruh ikan yang mendapatkan upah Rp. 20.000 per hari. Sehingga melihat hal itu jika diselaraskan dengan Bank Dunia maka dapat dikatakan bahwa kemiskinan yang ada di Desa Purworejo termasuk desa miskin pada tahun 2021. Karena batasnya pendapatan menurut World Bank adalah Rp. 27.360 per orang per hari. Sehingga jika dikonversikan dari pendapatan masyarakat Desa Purworejo termasuk kedalam kategori miskin.

Sebagaimana kondisi masyarakat Desa Purworejo yang sampai pada tahun 2021 mengalami dinamika grafik dengan jumlah Kelompok Penerima Manfaat yang banyak yaitu 8666 jiwa dari 9597 jiwa sehingga memperlihatkan kondisi kemiskinan yang ekstrem. Meskipun pada nyatanya desa ini sedang merangkak menuju desa berkembang yang notabennya akan meninggalkan sebutan desa miskin. Namun pada faktanya Desa Purworejo masih memiliki permasalahan kemiskinan yang sangat ekstrem. Sehingga kondisi ini perlu diperhatikan sebagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan agar tidak terus berlanjut dan dapat segera keluar dari desa miskin.

Penanggulangan kemiskinan di Desa Purworejo telah dilakukan dengan upaya pemaksimalan dana APBDes dan penetapan kebijakan perdes serta strategi percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberian program-program baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah desa yakni berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Sembako, Kartu Indonesia Pintar, dan lain sebagainya. Adapun sebanyak 872 jiwa di Desa Purworejo mendapatkan bantuan PKH.

BAB IV

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DESA PURWOREJO

A. Penetapan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Penetapan kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan rencana strategi dalam mengurangi angka kemiskinan sehingga kebijakan tersebut menjadi acuan kerja pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di suatu daerah. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak juga berbanding lurus dengan kebijakan pemerintah provinsi Jawa Tengah yang mana kebijakan tersebut dituangkan ke dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023. Adapun kebijakan tersebut juga dijadikan landasan Pemerintahan Kabupaten Demak dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem yaitu dituangkan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Tata Kelola Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan.

Dengan berlandaskan pada kebijakan secara struktural dari tingkat pemerintahan baik pusat provinsi Jawa Tengah maupun pemerintahan daerah Kabupaten Demak dan atas kesepakatan masyarakat, Desa Purworejo telah menetapkan sebuah kebijakan penanggulangan kemiskinan yaitu melalui Peraturan Desa Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2016-2022. RPJM Desa Purworejo ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan visi Kepala Desa pada jangka 6 tahun yaitu “Melayani Masyarakat Desa Purworejo Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Desa Purworejo yang Maju, Mandiri, Sehat, dan Sejahtera”.

Selain itu, kebijakan kemiskinan yang awalnya dari RPJMDes di spesifikkan lagi ke dalam Peraturan Desa No 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Tahun Anggaran 2021. Landasan hukum

tersebut menjadi dasar pelaksanaan beberapa program yang muaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan aktualisasi pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat miskin. Pemenuhan hak dasar bagi masyarakat ini diambilkan dari pembiayaan Anggaran Dana Desa berupa 69.82% untuk menanggulangi kemiskinan.

Orientasi landasan yang digunakan Desa Purworejo tersebut, dirumuskan melalui kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang di formulasikan secara khusus mengenai penanggulangan kemiskinan. Adapun upaya dalam menentukan kebijakan publik partisipatif diselaraskan dengan teori Muchlis Hamdi yang berkaitan dengan analisis kebijakan partisipatif. Dalam tahapannya ada empat langkah yaitu perumusan masalah kebijakan, perumusan alternatif kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penyusunan makalah kebijakan.

1. Perumusan Masalah Kebijakan

Dalam proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, langkah pertama adalah dengan merumuskan masalah kebijakan. Dalam merumuskan masalah kebijakan ini termuat ke dalam beberapa cara yang dibangun pemerintah dan masyarakat. Yakni dalam forum-forum kecil seperti perkumpulan jamiyah, perkumpulan pemuda-pemudi, perkumpulan kelompok. Sehingga dari forum tersebut akan mendiskusikan apa saja kebutuhan masyarakat atau isu yang kiranya perlu dibahas termasuk pada isu masalah penuntasan kemiskinan, sehingga kemudian usulan tersebut akan dibawa ke tingkat RT/RW dan kemudian diputuskan dalam tingkat musyawarah desa (musdes). Pada pelaksanaan musdes dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, Pemerintah Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan TP.PKK dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari

penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan apa saja yang ada di desa.

Pada proses ini pemerintah Desa Purworejo bersama dengan unsur lainnya menjumpai bahwa banyak sekali temuan permasalahan yang bergejolak sehingga dari forum rapat baik di tingkat dusun maupun di tingkat desa perlu memetakan mana saja yang perlu untuk mendapatkan penyelesaian terlebih dahulu dari pemerintah dan mencarikan solusi atas apa yang terjadi.

Perumusan masalah kebijakan dalam penyusunan RKP dipetakan yang meliputi, aspek pendidikan, aspek pembangunan, aspek kesehatan, aspek sosial, aspek lingkungan, aspek ekonomi, sumber daya. Dari pemetaan setiap aspek tersebut nantinya akan melalui tahap berikutnya yaitu berupa pemilihan alternatif kebijakan. Dalam perumusan kebijakan semua yang menjadi ide atau gagasan dari masyarakat akan ditampung oleh Pemerintah Desa. Sehingga ide atau gagasan tersebut tidak serta merta akan direalisasikan semuanya, akan tetapi dari pemerintah desa dan tim penyusunan RKP Des akan memilih usulan yang bersifat mendesak, sehingga kemudian usulan tersebut akan menjadi prioritas dalam kerja pemerintah tahun 2021.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Bapak Usud bahwa,

“Membahas mengenai masalah dan isu yang perlu diperhatikan dan diselesaikan, banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi Desa Purworejo. Sangat kompleks permasalahan yang terjadi di Desa Purworejo diantaranya masalah pendidikan, kesehatan, lingkungan, kondisi jalan, jumlah penduduk, keadaan-keadaan tersebut adalah turunan yang akan berdampak pada kemiskinan. Membutuhkan waktu lama untuk sedikit demi sedikit merubah kondisi tersebut ke yang lebih baik lagi. Namun

tetap, kami sebagai pemerintah desa yang memiliki kewajiban dalam mengatur dan mengurus desa, saya selaku kepala desa berikhtiar untuk mencari solusi bersama warga dengan melalui optimalisasi kebijakan bagi masyarakat.”

Kebijakan yang diusulkan tidak semata mata hanya sebagai formalitas saja dalam suatu pertemuan, akan tetapi ini juga mengarah pada solusi potensial yang berkenaan langsung dengan tindakan penanggulangan kemiskinan. Sebagai orientasi hidup masyarakat, kebijakan Perdes No 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 yang secara khusus membahas mengenai penanggulangan kemiskinan ini memberikan dasar bagi pengembangan nilai, keyakinan, dan sikap masyarakat terhadap kelayakan suatu kebijakan publik. Dengan demikian, penentuan kelayakan kebijakan yang disajikan dari awal akan bisa dilihat dalam penyusunan RKP Desa Tahun 2021. Kelayakan yang dimaksud adalah bagaimana RKPDes ini berperan secara optimal dalam menuntaskan permasalahan yang terjadi.

2. Perumusan Alternatif Kebijakan

Setelah mengamati apa saja masalah yang ada di Desa Purworejo, langkah selanjutnya adalah perumusan alternatif kebijakan sebagaimana teori Muchlis Hamdi bahwa dalam perumusan ini mencakup tujuan, anggaran, hambatan, dampak, waktu, dan resiko. Tujuan dari pada perumusan ini adalah berlandaskan kepada visi dan misi kepala desa dalam membangun desanya. Untuk anggaran sebagaimana yang disampaikan oleh kepala desa Purworejo, bahwa anggaran yang didapat berasal dari APBDes dan dana desa.

Sedangkan hambatannya adalah *action participatory* dalam menanggulangi kemiskinan. Wujud nyata dari implementasi program masih belum maksimal, hal ini disampaikan secara terang-

terangan dalam proses perumusan alternatif kebijakan. Dampak dari pada kebijakan yang tidak terlaksana adalah angka kemiskinan berpotensi untuk meningkat dan akan memunculkan permasalahan baru.

Dalam perumusan alternatif kebijakan ini nantinya akan menjadi opsi dalam memunculkan alternatif-alternatif baru. Adapun dalam perumusan alternatif kebijakan ini menghasilkan intervensi kegiatan atau program yang relevan dengan arah penanggulangan kemiskinan. Masyarakat Desa Purworejo dalam hal ini juga turut terlibat dalam kegiatan perumusan solusi atas masalah yang sedang terjadi. Masyarakat mengusulkan pembangunan jembatan penghubung antar dusun, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, penuntasan masalah stunting, jambanisasi, pembangunan talud, bantuan untuk orang tidak mampu seperti dalam aspek pendidikan, ekonomi, sosial, pelatihan wirausaha, pemberdayaan Ibu-Ibu PKK, pembangunan fasilitas desa seperti perpustakaan, dan pembangunan modal usaha.

Usulan-usulan tersebut menjadi dasar pemerintah desa dalam memutuskan rencana kerja yang dilaksanakan pada Tahun 2021. Adapun usulan usulan tersebut adalah murni dari forum masyarakat Desa Purworejo. Usulan tersebut didapat dari forum jamiyah, rapat tingkat dusun, rapat tingkat desa, pembahasan informal melalui kelompok-kelompok yang ada di Desa Purworejo, kemudian usulan tersebut dikoordinir oleh ketua wilayah baik RT atau RW, kemudian diusulkan saat musyawarah desa dalam penyusunan RKP Des Tahun 2021.

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan

Pemilihan alternatif kebijakan, langkah ini merupakan faktor esensial yang memiliki pengaruh pada kondisi desa kedepannya. Hal ini dikarenakan, dasar pemilihan tersebut nantinya akan memperlihatkan berhasil atau tidaknya suatu kinerja pemerintahan

dalam mengurangi angka kemiskinan. Dengan demikian, fungsi dari kebijakan yang sesuai akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan makmur.

Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan alternatif dipaparkan menjadi beberapa hal. Pertama, partisipasi masyarakat didalam menyampaikan ide dan gagasan yang tentunya masyarakat ini sebagai pelaku utama dalam penanggulangan kemiskinan. Tanpa adanya partisipasi maka kebijakan tidak akan lahir, sehingga partisipasi memiliki kekuatan dalam menentukan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan. Kedua, organisasi atau komunitas yang ikut terlibat akan memberikan profit kepada pemerintah desa, dalam konteks ini komponen-komponen yang ikut bergabung adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, pemerintah desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), BPD, dan TP-PKK.

Bersamaan dengan hal itu, pemerintah desa juga mengkonstruksikan alternatif kebijakan mana saja yang sesuai dengan prioritas kebutuhan. Sebagaiman yang disampaikan Bapak Usud bahwa

“Solusi permasalahan yang ada di Desa Purworejo, khususnya pada masalah kemiskinan. saya dan masyarakat telah melakukan rapat baik secara formal maupun non formal. Dalam membahas alternatif agar masyarakat bisa hidup tanpa kemiskinan. Kemudian hal ini nantinya akan dituangkan ke dalam rencana kerja pemerintah Adapun formulasi penyusunan RKPDes Purworejo sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang bisa dipedomani serta telah melibatkan stakeholders dari lembaga kemasyarakatan. RPPDes ini juga yang nantinya akan membawa kemajuan Desa Purworejo pada khususnya. Meskipun tidak langsung

dalam skala besar, namun setidaknya ada perubahan yang memberikan keberuntungan bagi masyarakat.”

Dari upaya terpadu yang telah dirancang dalam RKP Desa Purworejo tersebut mengenai penanggulangan kemiskinan. Kepala Desa menyampaikan bahwa masyarakat sudah melakukan musyawarah baik di tingkat dusun maupun pada musyawarah tingkat desa dengan melalui proses penyerapan aspirasi dari masyarakat baik secara formal maupun informal. Musyawarah tersebut dilakukan secara terus menerus untuk menjawab usulan masyarakat.

Kepala Urusan Kesejahteraan dan Kepala Urusan Perencanaan Pembangunan. Hasilnya, Desa Purworejo sudah melakukan sosialisasi, selain itu peraturan yang digunakan juga sesuai dengan penyerapan aspirasi dari masyarakat yang termasuk dalam Kelompok Penerima Manfaat. Dalam upaya sosialisasi tersebut tidak semua masyarakat dapat hadir, karena pada kegiatan yang menggunakan konsep demokrasi perwakilan, artinya masyarakat yang tidak hadir bisa mendapatkan informasi dari perwakilan masyarakat yang hadir dan disebarluaskan secara langsung melalui lisan maupun tulisan.

Dalam pelaksanaan proses kebijakan tersebut, pemerintah desa melibatkan *stakeholders* atau unsur yang terlibat meliputi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), BPD, dan TP-PKK turut hadir dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, kebijakan yang dibangun tersebut selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Muchlis Hamdi mengenai kebijakan publik partisipatif yang mana segala keputusan kebijakan telah melibatkan semua *stakeholder* secara berkesinambungan dan proporsional (Muchlis Hamdi).

Dari teori yang telah dipaparkan di atas, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan Bapak Adis Rohmatullah sebagai Kepala Urusan Perencanaan Pembangunan dan Bapak Ali Hafidz sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan melalui wawancara. Bahwasannya, pemerintahan Desa Purworejo sudah memberikan sosialisasi dan memberikan ruang terbuka bagi masyarakat. Sehingga melalui cara ini sedikit demi sedikit pemerintah desa dapat membangun semangat partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa.

Selain itu, informan dari pihak pendamping desa Bapak Agus menyampaikan bahwa dari pendamping desa telah memberikan pengarahan dan pendampingan kepada pihak desa maupun masyarakat untuk bisa menjalankan secara maksimal kebijakan-kebijakan yang telah diatur didalam Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Purworejo Tahun 2021. Berikut pernyataan pihak pendamping desa:

"Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Desa Purworejo merupakan kebijakan yang belum dibuatkan secara khusus dalam menanggulangi kemiskinan tersebut, masyarakat desa berpatokan pada RPJMDes. Peraturan RPJMDes tersebut memang belum mengatur sepenuhnya tentang kemiskinan, akan tetapi segala upaya terpadu, terencana, dan terarah telah dituangkan didalamnya. Termasuk dalam segala hal pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial yang ditunjukkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tidak lain, RPJMDes ini juga menjadi pedoman dalam menuntaskan kemiskinan melalui program-program yang telah disepakati."

Hal-hal yang diatur di dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut meliputi upaya penetapan sasaran setiap permasalahan, perancangan, penyusunan kebijakan, monitoring serta evaluasi. Selain itu, terdapat kebijakan lain yang mana

masyarakat diberikan ruang untuk ikut berkontribusi dalam lembaga kemasyarakatan. Dan kemudian lembaga kemasyarakatan tersebut akan digandeng pemerintah dalam berkolaborasi.

Kebijakan tersebut berimplikasi terhadap upaya penetapan sasaran untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Maka dari itu, sasaran ini menjadi hal penting untuk menentukan siapa target yang akan dipilih. Sebagaimana kondisi yang ada di Desa Purworejo bahwa upaya penetapan sasaran ini dilihat dari pemutaakhiran DTKS, sehingga pemerintah desa dapat melihat kondisi masyarakat berdasarkan data, dan lebih lanjut dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori yang ditentukan.

Adapun upaya penetapan sasaran ini dipetakan sebagaimana kategori yang ada di Desa Purworejo yaitu sangat miskin, miskin, suka miskin, dimiskinkan, dan tidak miskin. Untuk penetapan sasaran pemerintah desa telah disesuaikan dengan kondisi nyata masyarakat. Namun sayangnya, indikator pengklasifikasian sasaran masyarakat miskin tidak terbuka dengan masyarakat luas. Dengan demikian, masyarakat tentu bertanya-tanya, hal apa saja yang sebenarnya dapat mengkategorikan bahwa sasaran tersebut benar-benar orang yang membutuhkan pertolongan berupa bantuan. Banyak masyarakat yang mengira tidak tepat sasaran. Pihak pemerintah desa sejauh ini hanya berupaya agar sasaran percepatan penanggulangan tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat yang dilihat dari DTKS.

Sebenarnya, pejabat pemerintahan desa dan orang yang berkepentingan terhadap desa mengakui bahwa pengkajian ulang sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan, langkah tersebut akan menjadi langkah yang efektif sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Purworejo bahwa data akurat sangat dibutuhkan pemerintah desa untuk menajamkan kategori kemiskinan bagi masyarakat yang ada di Desa Purworejo. Pemerintah Desa telah

menjalin komunikasi kepada Dinas Sosial untuk memvalidasi kembali data agar upaya terpadu yang telah dituangkan dalam sasaran kebijakan RPJM Desa Purworejo bisa direalisasikan dengan baik tanpa ada kecemburuan sosial yang berlebih.

Selain tepat sasaran yang menjadi perhatian pemerintah desa agar upaya terpadu dapat sesuai dengan target. Kebijakan lain yang menjadi fokus pemerintah desa yang bersinggungan dengan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
- b. Penuntasan Penyakit Stunting
- c. Pembangunan Jambanisasi
- d. Pembangunan Infrastruktur
- e. Pembangunan Infrastruktur

Dari beberapa kebijakan yang telah diputuskan secara musyawarah, maka kebijakan-kebijakan tersebut yang nantinya akan menjadi daya dukung pemerintah dan masyarakat dalam merealisasikan desa tanpa kemiskinan.

4. Penyusunan Makalah Kebijakan

Setelah tiga rangkaian analisis kebijakan tersebut disusun, maka langkah selanjutnya adalah pemerintah desa melakukan penyusunan makalah kebijakan. Penyusunan makalah kebijakan dalam permasalahan penanggulangan kemiskinan telah disepakati secara bersama dengan bukti preferensi yang telah dituliskan pada RPJM Desa Purworejo dan kemudian diturunkan pada Rencana Tahunan Pemerintah Desa. Rangkaian analisis kebijakan tersebut bertujuan untuk menyajikan alternatif kebijakan secara terstruktur. Hal itu juga mempertimbangkan masalah lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah kemiskinan, sehingga kemudian RKPDes ini diandalkan dalam segala bidang. Sebagaimana yang terjadi bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan ini berpedoman pada RKPDes.

Adapun hasil dari proses analisis kebijakan yang telah dimusyawarahkan dan disepakati secara bersama, terdapat kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar pemerintah desa didalam menanggulangi masalah kemiskinan. Tentu ini berdasar pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Purworejo Tahun 2021. Hasilnya adalah bahwa intervensi program yang diprioritaskan dan memiliki relevansi dengan penanggulangan kemiskinan di Desa Purworejo yaitu

- a. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
- b. Penuntasan Penyakit Stunting
- c. Pembangunan Jambanisasi
- d. Pembangunan Infrastruktur
- e. Pembiayaan bantuan kemiskinan

Selain memberikan ruang terbuka untuk menyampaikan pendapat ke Pemerintah Desa Purworejo dan juga validasi penetapan intervensi kegiatan. Ada pula implementasi program kerja, yang dijadikan sebagai target dalam menurunkan angka kemiskinan melalui kebijakan yang dibuat. Seperti halnya, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melakukan pembinaan kemasyarakatan melalui lembaga-lembaga masyarakat.

Upaya tersebut membuat Desa Purworejo menjadi salah satu desa berkembang di Kabupaten Demak yang masih berupaya untuk bertransformasi menjadi desa yang lebih baik lagi. Transformasi yang dilakukan Desa Purworejo dimulai sejak menjadi desa tertinggal kemudian menjadi desa miskin dan saat ini sudah menjadi desa berkembang.

Transformasi tersebut tentunya tidak akan berkesudahan pada stereotip desa berkembang saja. Pemerintahan desa terus bergerak maju mengupayakan Desa Purworejo terbentuk menjadi desa yang perlahan bisa mengentaskan tingkat kemiskinan. Namun pada tahun

2021 angka kemiskinan naik drastis pada tahun 2021 yang awal mulanya prosentase kemiskinan sebesar 70% kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 90%. Naiknya angka kemiskinan tersebut dimonitoring oleh pemerintah desa. Upaya yang dilaksanakan pemerintah desa tersebut ditekankan pada program-program yang telah direncanakan.

B. Arah dan Strategi Kebijakan

Program-program yang telah diputuskan kemudian di implementasikan dalam kurun waktu satu tahun sebagaimana Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 Tentang RKP Desa Purworejo Tahun Anggaran 2021. Program kebijakan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini adalah program yang memiliki kemanfaatan besar bagi masyarakat Desa Purworejo. Pasalnya program ini sangat dibutuhkan masyarakat kurang mampu, bantuan ini memiliki indikator yang mendukung dalam proses pengajuan rehabilitasi yaitu dengan kondisi rumah yang memiliki rumah kurang sehat, kurang aman, dan pembangunan berpengaruh pada kelayakan rumah, sehingga ini dapat menjadi salah satu bantuan bagi masyarakat miskin yang belum mampu menciptakan rumah layak huni tersebut. Maka dengan itu Pemerintah Desa membentuk program ini dengan tujuan agar masyarakat bisa hidup secara aman, nyaman, dan sehat.

Adapun bantuan ini merupakan program dari pemerintah desa yang direncanakan secara khusus sebagai tonggak dalam membantu masyarakat miskin yang mana bantuan ini bersumber dari dana desa, bantuan ini juga didukung oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah yang mana dalam hal ini pemerintah provinsi Jawa Tengah juga mencanangkan program menuntaskan kemiskinan lokal. Adapun anggaran yang diberikan oleh pemerintah desa sebesar 0,18 persen diambilkan dari dana desa sehingga jika dialokasikan setiap

rumah akan mendapatkan bantuan sejumlah Rp. 1.500.000 per rumah dengan sasaran 10 rumah tahun 2021, sedangkan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah menganggarkan Rp. 1.000.000 per rumah dengan sasaran 10 rumah. Sehingga dalam program pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2021 terdapat 15 rumah yang menjadi target dalam penuntasan masalah kemiskinan.



Gambar 5 : Rehabiltasi RTLH RT 2 RW 1

Bentuk bantuan diberikan langsung oleh perangkat desa melalui tugas pokok dan fungsi sebagai Kaur. Perencanaan Pembangunan dan dibantu pula oleh Kaur. Kesejahteraan. Untuk bentuk bantuan sendiri adalah berupa material yang telah dibeli oleh pemerintah desa, bukan berupa kebutuhan rehabilitasi. Dan sebelumnya juga telah dilaksanakan koordinasi bersama dengan penerima rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk membahas kebutuhan masyarakat yang bersangkutan agar sesuai dengan prioritas kebutuhan rehabilitasi.

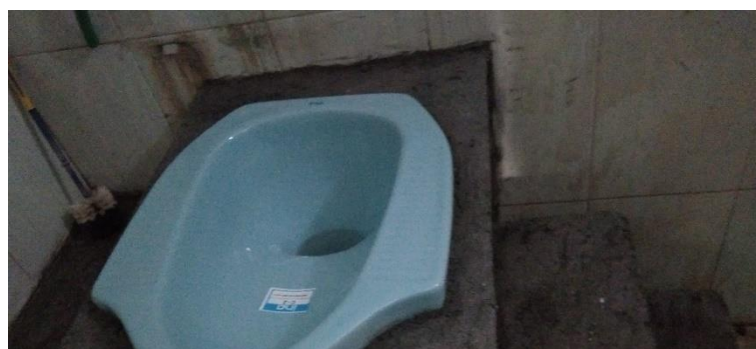
2. Penuntasan penyakit stunting

Penuntasan penyakit stunting ini merupakan turunan dari masalah kemiskinan, yang mana masyarakat miskin masih terbengkalai dengan kondisi kesehatannya, sehingga muncul penyakit stunting yang tinggi di Desa Purworejo. Kekurangan gizi, konsumsi yang baik, masih belum dihadirkan masyarakat Desa. Memang karena keadaan pendapatan keluarga yang relatif rendah sehingga ada beberapa aspek yang dikorbankan, termasuk aspek kesehatan ini. Sehingga penyakit stunting ini menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah desa.

Dalam penuntasan penyakit stunting ini Pemerintah Desa berupaya dengan melalui pemberian makanan tambahan angka kemiskinan dapat menurun. Pemberian tambahan ini berupa makanan ringan seperti roti, susu, dan vitamin. Adapun untuk anggarannya Pemerintah Desa melalui dana desa menganggarkan beberapa program pada tahun 2021 melalui hasil putusannya yaitu Rp. 74.000.000 untuk balita dengan sasaran 781 anak, sedangkan untuk ibu hamil Rp.9.216.000 dengan sasaran 96 orang, dan untuk lansia adalah Rp.10.400.000 dengan sasaran 108 orang. Sehingga secara keseluruhan dana desa yang dikucurkan untuk pencegahan stunting ini adalah Rp.93.616.000 atau 10.92 persen dari dana desa.

3. Pembangunan jambanisasi

Program bantuan jambanisasi ini merupakan penyediaan sarana sanitasi jamban sehat. Hal ini diisyaratkan sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Karena sebagian besar masyarakat Desa Purworejo belum memiliki jamban. Mengingat jambanisasi ini sangat penting bagi masyarakat Desa Purworejo untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga hal ini juga dapat membantu masyarakat miskin, terutama pada segi pembiayaan.



Gambar 6 : pengadaan jambanisasi

Pengadaan jambanisasi tersebut adalah wujud dari lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga kondisi tersebut mampu menghadirkan kesadaran masyarakat untuk hidup produktif. Rumah tangga yang mendapatkan bantuan jambanisasi ini sebelumnya telah mendapatkan survei dari pemerintah desa yang kemudian di spesifikasikan kedalam golongan kebutuhan mendesak sehingga rumah-rumah yang belum memiliki jambanisasi atau sudah memiliki jambanisasi tidak layak huni akan dibuatkan jambanisasi.

Sebagaimana data yang telah didapatkan dari pihak pemerintah desa, bahwa jambanisasi yang ada di Desa Purworejo masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi jamban bersih dan sehat. Dari data terdapat 2345 KK terdapat 875 KK yang belum memiliki jamban. Sehingga hal ini perlu dikoordinasikan dengan masyarakat secara khusus agar pembangunan jambanisasi dapat dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan sumber dana desa.

Adapun untuk jambanisasi ini juga dianggarkan melalui dana desa sekitar 8,58% dengan pembiayaan Rp. 3.500.000 per jamban dengan sasaran 21 jamban. Sehingga pada tahun 2021 terdapat 21 jamban yang telah dilakukan pembangunan dengan anggaran secara keseluruhan mencapai Rp. 73.500.000. Jambanisasi ini sebagai salah satu program utama dari pemerintah Desa Purworejo dalam membantu masyarakat miskin agar dapat hidup secara sehat dan nyaman. Tentu ini menjadi opsi yang strategis dalam mengentaskan kemiskinan.

Pasalnya keadaan jambanisasi yang ada di Desa Purworejo sebagian belum memenuhi kualifikasi hidup bersih dan sehat. Bahkan masih banyak masyarakat Desa Purworejo yang melakukan

buang air besar sembarangan. Bahkan ketika banjir air rob datang, keadaan air tersebut menjadi ladang penyakit bagi masyarakat karena tercampurnya air dengan kotoran manusia. Sehingga pengadaan ini menjadi penting bagi masyarakat agar dapat dijadikan stimulan masyarakat supaya tidak lagi buang air besar secara sembarangan.

4. Pembangunan infrastruktur

Pembangunan infrastruktur baik fisik, ekonomi, maupun sosial juga menjadi salah satu pilihan alternatif dari musyawarah yang telah dilaksanakan. Yang mana pembangunan infrastruktur tersebut juga berimplikasi pada pencegahan kondisi kemiskinan yang terus berkembang. Pemenuhan kebutuhan dasar melalui pembangunan ini dimaksudkan sebagai kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun pembiayaan infrastruktur ini adalah berkisar 40% dari dana desa. Dengan alokasi pembangunan infrastruktur seperti pada pembangunan jalan, fasilitas kesehatan yang memadai, pembangunan penunjang ekonomi seperti pasar ikan yang memadai, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 2021 dalam memberikan pembangunan di desa.



Gambar 8. Pembangunan akses jalan menuju sekolah

Pada pembangunan fisik berupa pembangunan akses jalan ke sekolah ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan anak-anak untuk belajar sehingga nantinya ini dapat mengurangi angka kemiskinan melalui produktivitas anak-anak dalam mempersiapkan masa depan.

Parahnya kondisi akses jalan menuju ke tempat yang vital ini menjadi perhatian pemerintah desa dalam menata lagi, meskipun setiap tahunnya telah melakukan rehabilitasi jalan, namun karena keadaan alam yang tidak memungkinkan seperti banjir air rob yang kerap melanda didesa ini membuat pemerintah desa memastikan betul oprioritas pembangunan yang akan dilakukan.

5. Pembiayaan bantuan kemiskinan

Pembiayaan bantuan kemiskinan ini berupa bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah Desa Purworejo, dalam hal ini pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan bantuan berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Sembako, Kartu Indonesia Pintar, dan lain sebagainya. Sebagaimana data pemutaakhiran bantuan sejumlah 872 jiwa di Desa Purworejo mendapatkan bantuan PKH, sedangkan bantuan sembako sejumlah 2.654 jiwa, bantuan jamkesmas sejumlah 379 jiwa, KIP sejumlah 3.987 jiwa, dan bantuan lainnya.



Gambar 7 : Pendistribusian bantuan di Desa Purworejo

Pendistribusian bantuan ini adalah wujud dari upaya dari pengentasan kemiskinan yang ada di Desa Purworejo, bentuk dari pendistribusian di Desa Purworejo banyak sekali macamnya sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Pembiayaan bantuan menjadi aspek penting dalam membantu masyarakat mengangkat derajat ekonomi rumah tangga. Pasalnya ekonomi rumah tangga masyarakat Desa Purworejo termasuk dalam kategori ekonomi rendah. Sehingga dengan hadirnya bantuan ini menjadi alternatif masyarakat dalam mengelola ragam usaha dengan bantuan modal usaha maupun lainnya. Sehingga pembiayaan bantuan ini dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan bentuk bantuan yang didapatkan. Masyarakat berpartisipasi dalam mendapatkan haknya.

Dari pernyataan Kepala Desa Bapak Usud bahwa peraturan atau kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan yang berupa program-program yang telah direncanakan, kemudian disosialisasikan mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan, menurutnya sudah dilakukan sosialisasi di masyarakat baik secara formal maupun in formal, meskipun tidak semua warga mengetahui hanya kepada perwakilan masyarakat, RT/RW, LKMD, KPMD, dan perangkat desa namun proses penyampaian tersebut sudah diketahui dari masyarakat selain perwakilan tersebut. Hal itu menandakan bahwa terdapat kesesuaian terhadap teori kebijakan publik partisipatif yang membuka partisipasi publik untuk menyampaikan program atau keluhan masyarakat agar bisa ikut andil secara aktif.

Begitu pula halnya yang disampaikan Bapak Maftukhin sebagai ketua LKMD yang memelopori ketahanan masyarakat desa beliau juga menyampaikan bahwa sudah melakukan sosialisasi mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan terlebih khusus memberikan penguatan kepada masyarakat agar bisa berkembang dan maju. Sedangkan Pendamping Desa Bapak Agus menyampaikan bahwa solusi agar bisa keluar dari zona kemiskinan yang terus berlarut adalah dengan semuanya ikut andil secara maksimal dan saling bekerja sama sehingga tidak hanya

mengandalkan pada kinerja kepala desa saja melainkan pada kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri.

Kebijakan yang dibangun pada penanggulangan kemiskinan di Desa Purworejo diatur dalam RKP Des. Selain itu dalam kebijakan tersebut yang tercantum dalam pasal 6 menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan desa dalam menanggulangi kemiskinan adalah Pertama membangun sumber daya pemerintahan yang berkualitas. Kualitas dan kuantitas dalam pemerintah desa dan BPD adalah hal penting yang perlu ditingkatkan, pasalnya di Desa Purworejo telah ditentukan bahwa memang dalam pelembagaan pemerintah desa dan BPD termasuk dalam potret masalah dari sketsa Desa Purworejo. Sehingga upaya pertama atau arah kebijakan terarah pada kelembagaan terlebih dahulu.

Kedua, meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan, sehingga ini menjadi suatu bentuk strategi dalam percepatan penuntasan kemiskinan. Ketiga, melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Beberapa program pemberdayaan masyarakat telah banyak di tentukan untuk kemudian di implikasikan ke dalam kehidupan masyarakat. strategi ini di buat dengan tujuan agar masyarakat dapat berkembang melalui upaya pemberdayaan.

Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri. Ini merupakan cita-cita Desa Purworejo sebagaimana yang tertulis dalam visi dan misi desa. Strategi ini adalah upaya terpadu didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan langsung masyarakat dalam berbagai kegiatan.

Keempat, terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat, dan lestari. Kondisi ini termasuk langkah pemerintah dalam membangun suatu kemajuan desa melalui arah kebijakan yang ditetapkan. Keenam, terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Hal ini juga suatu rangkain

strategi dan arah kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan. Sehingga dari point pertama sampai dengan akhir merupakan suatu upaya dalam membangun kebijakan agar permasalahan kemiskinan dapat dituntaskan.

Selain itu, dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah desa sebagaimana yang disampaikan atas usulan masyarakat juga mengadakan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan antara lain, Pertama, penyediaan kebutuhan dasar masyarakat (RTLH, kesehatan, pendidikan, lingkungan, peningkatan ekonomi keluarga). Sebagaimana kondisi masyarakat miskin di Desa Purworejo ini memang sangat membutuhkan dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi dengan kondisi yang sangat memprihatinkan untyuk segera di perhatikan. Kedua, melakukan pembinaan dan pemberdayaan bagi masyarakat desa. Optimalisasi melalui pemberdayaan masyarakat miskin ini menyangkut pada aspek pengembangan masyrakat yang kemudian hasilnya akan membuat masyarakat lebih mandiri.

Kelima, pelatihan keahlian dan keterampilan untuk mengembangkan usaha secara mandiri meliputi, pelatihan siskeudes, pelatihan SDM LKMD, pelatihan KUB, pelatihan kelompok nelayan. Adanya pelatihan-pelatihan yang ada di Desa Purworejo ini memperikan uotput ke dalam penunjang ekonomi keluarga, dimana masyarakat akan didampingi untuk kegiatan tersebut. Keempat, membangun prasarana pelatihan usaha. Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, perlu adanya prasarana yang memadai sebagai penunjang dalam mengimplementasiakn rancangan-rancangan kebijakan yang telah diputuskan. Kelima, membangun sarana dan prasarana untuk produk dan komoditas unggulan desa. Desa Purworejo yang memiliki sebuah produk komoditas unggulan dari hasil lautnya, memungkinkan untuk pemenuhan kebutuhan sebagai akses masyarakat untuk menjamin keberlanjutan komoditas unggulan tersebut.

Keenam, membangun pemerintah mendorong infrastruktur dalam mendukung peningkatan kapasitas masyarakat miskin. Perencanaan pembangunan diprioritaskan ke dalam pembangunan infrastruktur sebagai

wujud dari pelayanan kemudan masyarakat. ketujuh, bantuan ketahanan masyarakat. bantuan ini sebagai dampak positif dari pembiayaan penanggulangan yang telah diputuskan untuk membantu masyarakat miskin dalam berkembang.

Upaya penanggulangan kemiskinan ini menjadi prioritas pemerintah desa dengan beberapa program yang telah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Purworejo Tahun 2016-2022. Pemerintah desa telah menetapkan arah kebijakan fiskal yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap melanjutkan kebijakan secara *bottom up*. Dengan demikian tersirat bahwa adanya kebijakan penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat mengalami penurunan. Adapun sasaran kebijakan ini penurunan absolut yang berbasis pada keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN

PENANGGULANAN KEMISKINAN

A. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Partisipasi masyarakat mutlak sangat diperlukan didalam menanggulangi suatu permasalahan yang ada, termasuk masalah kemiskinan yang ada di Desa Purworejo. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, kemiskinan menjadi masalah multidimensional yang perlu diselesaikan secara bijak dan tepat melalui payung hukum kebijakan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dibuat sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu pada RPJM Desa Purworejo dan dispesifikan dalam RKP Desa Purworejo. Tidak hanya pemerintah saja yang memiliki peran besar dalam menyelesaikan isu strategis kemiskinan, melainkan masyarakat juga perlu mengambil peran dalam ikut andil tanpa adanya paksaan dari siapapun sehingga partisipasi itu dapat dibangun dari kemauan dan kesadaran.

Kemajuan suatu desa dilihat dari adanya tingkat partisipasi masyarakat didalam mengikuti dan memahami masalah yang sedang terjadi, dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Jadi partisipasi merupakan penentu dalam menilai keberhasilannya suatu daerah. Dengan adanya partisipasi yang maksimal maka masyarakat yang terbelakang akan menjadi masyarakat yang produktif, modern, dan maju. Oleh karena itu realisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan bergantung pada partisipasi masyarakatnya.

Partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dilakukan melalui upaya-upaya terpadu dan terencana. Untuk melihat partisipasi masyarakat Desa Purworejo dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dilihat dari beberapa indikator yang menjadi pembahasan dalam penelitian

ini yaitu pada partisipasi masyarakat dalam bidang perencanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi.

Adapun sebagaimana data yang didapatkan dari data lapangan, berikut penjelasannya.

1. Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Perencanaan Kebijakan

Berdasarkan hasil observasi dan penelusuran dokumen terhadap masyarakat tentang perencanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan, seluruh elemen masyarakat seperti KPMD, LKMD, TP.PKK, Karang Taruna, Kelompok Nelayan, RT RW, BPD, dan lembaga lainnya terlibat dalam menyusun rencana-rencana kerja, memberikan usulan program kerja, termasuk juga memetakan permasalahan yang ada.



Gambar 10 : Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa tahun 2021

Dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah desa dan unsur masyarakat lainnya telah melakukan musyawarah dalam hal perumusan atau perencanaan kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan. Sehingga dalam pertemuan yang bersifat demokratisasi telah dirumuskan sebuah kebijakan yang mana kebijakan tersebut telah dituangkan pada RPJM Desa Purworejo No 1 Tahun 2017 dan RKP Desa Purworejo Tahun 2020. Adapun proses yang dilakukan

pemerintah Desa Purworejo didalam mengurangi angka kemiskinan adalah dengan memaksimalkan program-program kerja yang diusulkan dari masyarakat dan pemenuhan hak masyarakat miskin serta melakukan pendataan secara tepat agar sasaran dari program yang dirumuskan dapat sesuai dengan *goals* nya.

Keterlibatan masyarakat Desa Purworejo didalam tahap perencanaan ini merupakan suatu bentuk partisipasi, dimana masyarakat memiliki kekuatan didalam menentukan arah kebijakan perencanaan kebijakan. Dengan perwujudan hadirnya masyarakat di forum musyawarah baik ditingkat dusun maupun desa, hal itu sebagai bentuk dari adanya demokratisasi didalam menyampaikan aspirasi, masukan, kritikan, dan opini publik. Yang mana dalam demokratisasi masyarakat mendapat peluang untuk membangun ruang publik secara *bottom up*. Model komunikasi secara *bottom up* ini telah dibangun di Desa Purworejo, dimana pemerintah desa mempersilakan masyarakat untuk membuat forum dalam mendiskusikan segala permasalahan. Diharapkan melalui ruang terbuka tersebut masyarakat dapat leluasa menyampaikan segala inisiasinya tanpa adanya paksaan.

Termasuk pada inisiasi atas lembaga kemasyarakatan yaitu membentuk Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di Desa Purworejo, hal ini merupakan salah satu upaya dalam membangun kepedulian masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat agar bisa merubah kondisi desa menjadi lebih baik. Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa menumbuhkan kepedulian dalam melaksanakan program program yang telah dibuat melalui hasil RKP Des Tahun 2020 yang akan direalisasikan pada tahun 2021. Hal tersebut selaras dengan teori Sherry Arnstein yang menyatakan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi secara bebas tanpa adanya ikatan didalam mengoperasikan program kegiatan yang ada di desa. Terbukti ini juga terjadi pada masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan maupun

masyarakat non lembaga yang berpartisipasi dalam melaksanakan program kegiatan atas kebijakan yang telah ditetapkan.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa masyarakat menganggap kemiskinan itu adalah hal biasa, sehingga mereka tidak perlu melakukan sesuatu untuk menanganinya. Sehingga dari argument tersebut masyarakat Desa Purworejo hanya mengandalkan pemerintah desa saja dalam penanggulangan kemiskinan. Terlepas dari asumsi masyarakat yang hanya mengandalkan pemerintah, melihat hal itu pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan Desa Purworejo untuk terus memberikan edukasi tentang pentingnya gotong royong dalam membangun desa.

Perencanaan dalam membangun desa yang dispesifikkan kedalam penanggulangan kemiskinan tersebut mengupayakan pengurangan angka kemiskinan yang semakin melonjak sebagaimana angka kemiskinan pada tahun 2021 menunjukkan 90% masyarakat tergolong dalam kategori miskin. Oleh karena itu penting perencanaan pembangunan sebagai alat bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan peluang didalam membangun ekonomi secara mandiri dengan memanfaatkan program-program penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat.

Sebagaimana hasil data yang didapatkan dari lapangan, bahwa partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan pada tahun 2021 menunjukkan belum maksimalnya kerja sama yang baik antara masyarakat ke pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya rasa peduli untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan. Bahkan masyarakat masih ada yang bersikap acuh tak acuh dengan kondisi kemiskinan yang semakin meningkat.

Demokrasi perwakilan diterapkan pada kegiatan perumusan perencanaan penanggulangan kemiskinan. Padatnya jumlah penduduk yang tidak dapat menampung keseluruhan, sehingga hanya orang-orang tertentu yang diundang untuk hadir didalam musyawarah tersebut.

Meskipun tidak keseluruhan, namun informasi hasil musyawarah yang didapatkan nantinya akan disampaikan oleh perwakilan masyarakat yang hadir dengan melalui penyampaian di masyarakat secara formal maupun informal.

Meskipun tergolong pada sumber daya masyarakat yang kurang baik, sebagaimana yang diungkapkan Kepala desa bahwa pada saat ada kegiatan perumusan perencanaan pembangunan masyarakat tetap menyampaikan usulan usulan yang kiranya itu adalah kebutuhan masyarakat didalam mengupayakan hak masyarakat miskin, namun usulan tersebut akan juga di tindak lanjuti apakah akan diwujudkan atau tidak melihat situasi dan prioritas kebutuhan desa yang mendesak.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Adis selaku Kepala Urusan Perencanaan Pembangunan Desa Purworejo bahwa,

“Pembangunan yang ada di Desa Purworejo itu belum sepenuhnya menunjang aktivitas masyarakat desa, banyak sekali pembangunan yang butuh diselesaikan dan butuh tambahan pembangunan lagi. Upaya tersebut mungkin bisa memungkinkan Desa Purworejo lebih maju.”

Secara umum peran masyarakat dalam merencanakan pembangunan di Desa Purworejo masih mengandalkan kinerja pemerintah. Masyarakat kurang memiliki inisiatif untuk membangun kesadaran dan kemauannya sendiri. Sebagian masyarakat menganggap bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk memulai suatu kegiatan yang bermitra dengan pemerintah desa. Pada teorinya Arnstein menjelaskan bahwa pada dasarnya masyarakat memiliki kekuatan didalam membangun arah kebijakan, kekuatan yang hadir dari masyarakatlah yang mampu mengendalikan segala hasil proses.

Dalam merencanakan pembangunan disusun atas dasar kebutuhan masyarakat yang diatasnamakan atau diwakilkan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Tidak seluruh masyarakat dapat hadir, melainkan

masyarakat tertentu yang telah ditunjuk. Kerangka hasil perencanaan pembangunan disusun bersama masyarakat tertentu dalam suatu kebijakan dalam pembangunan desa.

Disisi lain, pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebijakan tidak hanya dibahas dalam forum formal, melainkan juga terdapat ruang-ruang masyarakat untuk berdiskusi dan mencari solusi. Termasuk pada kegiatan kumpulan di tingkat dusun.



Gambar 11 : Musyawarah tingkat dusun

Forum yang dibangun pada perkumpulan di tingkat dusun, dijadikan masyarakat sebagai wadah untuk berpartisipasi. Adapun usulan –usulan yang diusulkan masyarakat dalam forum musyawarah adalah adanya pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat yaitu berupa pembangunan fisik terlebih dahulu berupa betonisasi jalan, RTLH, jembatanisasi, normalisasi, peninggian talut, dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang disampaikan Kepala Desa Purworejo Bapak Us'ud bahwa

“Usulan masyarakat dalam pembangunan desa yang diorientasikan pada penanggulangan kebijakan, biasanya berbentuk fisik. Seperti pembangunan-pembangunan yang memang dibutuhkan masyarakat. seperti di desa purwprejo

sendiri, kondisi akses jalan dan jembatan penghubung yang memang perlu diprioritaskan. Pembangunan yang seperti ini dapat mempermudah aktivitas masyarakat dalam mencari pendapatan keluarga.”

Oleh karena itu, dalam membangun suatu sistem pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator yang realistis dan kemudian di terjemahkan kedalam beberapa program yang kiranya hal itu merupakan langkah tepat dalam menanggulangi kemiskinan. Indikator tersebut harus menyangkut indikator-indikator dalam pemahaman sebab kemiskinan itu terjadi. Sejalan dengan hal tersebut didasarkan pada lingkaran kemiskinan yaitu keamanan, sosial, politik, kebijakan, kebebasan, sumber daya, dan aksesibilitas.

Adapun sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan berpedoman pada RPJM Desa Purworejo dan RKP Des Tahun 2021. Arah kebijakan yang telah disepakati meliputi belanja Kepala Desa dan perangkat desa, intensif dan operasional RT dan RW, operasional lembaga kemasyarakatan desa, tunjangan operasional BPD, program Operasional pemerintah desa, program pelayanan dasar, program pelayanan dasar infrastruktur, program kebutuhan primer pangan, program pelayanan dasar pendidikan, program pelayanan kesehatan, program kebutuhan primer sandang, program penyelenggaraan pemerintah desa, program pemberdayaan masyarakat, program ekonomi kreatif, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa, program penunjang hari-hari besar, dan program peningkatan kader dan kelompok masyarakat melalui pelatihan.

Antusias masyarakat dalam tahapan menentukan kebijakan penanggulangan kemiskinan ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari adanya partisipasi ini adalah mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama dalam

menanggulangi kemiskinan, dengan cara meningkatkan keaktifan masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kebijakan yang telah ditentukan dan memberikan pembaharuan kebijakan baru, jika memang hal itu dibutuhkan masyarakat dalam jangka panjang. Artinya kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis, tidak dapat dipungkiri jika kebijakan itu dapat di ubah sebagaimana kondisi masyarakat.

2. Partisipasi masyarakat dalam bidang pelaksanaan kebijakan

Partisipasi masyarakat juga bisa dilihat dalam proses implementasi kebijakan, pada proses ini sangat berpengaruh pada berhasil atau tidaknya kebijakan yang telah dirumuskan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Implementasi kebijakan sebagaimana yang telah dijelaskan didalam rumusan RKP Des bahwa program-program yang dibuat ini seyogyanya bertujuan pada pengentasan kemiskinan yang ada di Desa Purworejo. Dimana melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan jambanisasi, pembangunan infrastruktur, pencegahan stunting ini dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan agar tidak terus berkembang. Untuk implementasi program tersebut sudah terealisasi semuanya.

Masyarakat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada, meskipun tidak semuanya ikut andil. Namun wujud partisipasi dapat dilihat dari antusias masyarakat yang ingin bermitra dengan pemerintah desa. Sebagaimana yang telah dilakukan di desa ini, termasuk pada rehabilitasi pembangunan rumah tidak layak huni ini mendapatkan sambutan atau respon yang baik dari masyarakat dalam menerima program dari pemerintah desa. Untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni terdapat 20 rumah yang menjadi target rehabilitasi pada tahun 2021 ini. Rehabilitasi ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin dari segi pembiayaan untuk mewujudkan rumah yang sehat dan nyaman.

Sedangkan pada pembangunan jambanisasi ini mendapatkan bantuan Rp. 3.500.000 per jamban dengan target 21 jamban. Program

ini adalah hasil dari usulan masyarakat yang telah tertampung pada proses awal yaitu perumusan masalah, sehingga kemudian ini di implementasikan didalam masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal ini sangat antusias didalam menjalankan program kerja terkhusus pembangunan jambanisasi ini. Karena memang masyarakat sangat butuh dalam jamban ini.

Kemudian untuk partisipasi masyarakat dalam hal pencegahan stunting ini diwujudkan dalam pemberian makanan tambahan. Dengan melalui bantuan dana desa. Selain itu juga pemerintah desa fokus pada pembangunan dalam memudahkan urusan masyarakat untuk produktif. Adapun pembangunan tersebut pada tahun 2021 adalah membangun akses jalan menuju sekolah.



Gambar 7 : Pelaksanaan pembangunan tahun 2021

Pelaksanaan pembangunan dalam menanggulangi kemiskinan dalam sajian gambar diatas dilaksanakan dalam bentuk betonisasi jalan, dan pembangunan lainnya berupa jembatanisasi, normalisasi, bedah rumah, dan peninggihan talud. Dimana kebijakan penanggulangan kemiskinan ini juga mengarah pada pembangunan fisik. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat membangun kepedulian berupa musyawarah, keswadayaan, gotong royong. Hal tersebut nantinya mendorong pada perilaku masyarakat untuk

mencapai kemandirian dan kepedulian untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Namun sebagaimana fakta yang ada dilapangan, bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya antusias secara penuh sehingga kepedulian yang terjadi di masyarakat masih belum terbentuk secara maksimal. Ketidakmandirian masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu penghambat mewujudkan program. Partisipasi lain yaitu terjadi pada program pembiayaan bantuan dari pemerintah sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Pada lingkup ini masyarakat sangat antusias didalam mendukung program tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh ketua LKMD Bapak Maftukhin:

“Berbagai program yang ada saat ini termasuk pada tahun 2021 masih belum maksimal, misalnya salah sasaran. Hal tersebut secara tidak langsung melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, dll). Lemahnya kapital berdampak pada semakin jauhnya masyarakat didalam terjun ke desa untuk ikut andil dalam mengatasi kemiskinan. singkatnya masyarakat memiliki rasa iri atas bantuan yang diberikan pemerintah.”

Selaras dengan hal itu, disampaikan oleh Kepala Desa Bapak Usud bahwa

“Kemiskinan di Desa Purworejo digolongkan ke dalam 5 golongan yaitu, sangat miskin, miskin, dimiskinkan, suka miskin, tidak miskin. Maka didalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan, pemdes harus benar-benar mensinkronkan data agar upaya tepat sasaran bisa diwujudkan.”

Banyaknya program yang direncanakan baik dalam pembangunan fisik, sosial, maupun ekonomi ini tidak lain adalah sebagai upaya terpadu penanggulangan kemiskinan. Aspek yang terpaut tidak hanya ekonomi yang terjadi, melainkan termasuk proses politik, sosial, pendidikan juga menjadi salah satu aspek yang melatarbelakangi pembangunan yang harus selalu dilakukan demi masyarakat sejahtera.

Perencanaan dalam bidang ekonomi ditetapkan melalui kebijakan yang berupa pembangunan pasar desa dan peningkatan Badan Usaha Milik Desa. Namun dalam peningkatan ekonomi desa secara mandiri ini belum terlaksana karena tidak ada anggaran yang tertuju pada pembangunan pasar tersebut. Anggaran dialokasikan bergantian dengan pembangunan yang lainnya yang juga membutuhkan penanganan. Keadaan pasar yang kurang memadai tersebut mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan pembangunan pasar baru sebagai pasar pelelangan ikan yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui produktivitas hasil tangkapan ikan.

Pasar tersebut telah melalui pembangunan yang terus menerus, namun karena pasar desa sering terkena dampak banjir air rob, sehingga hal tersebut menjadi kendala keuangan desa dalam mengalokasikan dana desa untuk pembangunan pasar tersebut. Di Desa Purworejo tidak hanya bermasalah pada itu saja, melainkan banyak potensi masalah yang memang Pemerintah Desa Purworejo harus bisa mengalokasikan dana desa sebagaimana prioritas yang mendesak bagi masyarakat. Seperti masalah MCK masyarakat belum ada, jembatan penghubung jalan utama belum ada, masih banyak sekali jalan yang belum dibetonisasi, jembatan penghubung setiap dusun banyak yang rusak. Oleh karena itu, formulasi kebijakan yang dibuat harus bisa mengakomodir daftar masalah yang ada sesuai dengan pemetaan pada tahapan awal.

Permasalahan tersebut diperparah dengan kebiasaan sebagian besar penduduknya yang menganggap bahwa kemiskinan itu menjadi hal biasa. Bahkan kebiasaan buruk terjadi pada masyarakat Desa Purworejo yang mana sebagian besar penduduknya melakukan kegiatan buang air besar sembarangan, membuang sampah sembarangan. Hal tersebut disebabkan oleh MCK masyarakat masih belum memadai dan kesadaran masyarakat akan pentingnya masalah sampah masih kurang aktif. Hal ini menunjukkan adanya rendahnya pola hidup masyarakat didalam mengelola lingkungan.

Adapun partisipasi yang dimaksud disini tidak cukup hanya dari wewenang pemerintah saja, melainkan pentingnya partisipasi publik, agar bisa merasionalkan kebijakan yang terbentuk. Adapun partisipasi yang ada di Desa Purworejo datang dari unsur yakni lembaga kemasyarakatan baik LKMD, KPMD, Karang Taruna, TP-PKK, dan seluruh masyarakat Desa Purworejo. Meskipun pada faktanya, semua masyarakat tidak semuanya ikut dalam prgram kebijakan namun masyarakat mendukung upaya program tersebut.

Disampaikan oleh Bapak Fakhru sebagai tokoh masyarakat,

“Masyarakat desa disini pada umumnya mendukung segala kegiatan desa, namun masarakat disini biasanya mementingkan untuk (miyang) mencari ikan daripada mengurus kegiatan yang tidak ada keuntungan bagi mereka. Secara realistis mereka akan fokus pada mencari uang.”

Partisipasi dalam merealisasikan kebijakan yang telah diputuskan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menunjang keberhasilannya suatu program. Dalam tahap partisipasi masyarakat dapat terlihat pada antusias masyarakat dalam merespon segala program yang dibuat. Termasuk pula pemerintah desa juga menggandeng lembaga kemasyarakatan yang

ada didesa untuk turut terlibat mencari solusi alternatif yang sesuai dengan kebutuhan kondisi desa.



Gambar 12 : Menjalin mitra dengan lembaga kemasyarakatan

Pada partisipasi penanggulangan kemiskinan yang sebelumnya telah dirumuskan, terlihat bahwa partisipasi yang dibangun belum maksimal Masyarakat belum maksimal dalam memberikan sumbangsih berupa tenaga, uang, dan ide.

Ibu Rusada menjelaskan bahwa

“Saya berpartisipasi ketika ada timbal balik buat saya, contohnya adalah saya sebagai penerima kelompok manfaat. Saya rajin hadir dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan itu karena memang saya butuh gitu.”

Hal serupa juga sama dikatakan oleh ibu Wartini.

“Saya termasuk masyarakat yang kurang mampu, ketika ikut serta saya tidak punya kekuatan apa-apa, jadi ya saya manut saja dengan pemerintah. Namun kalau berhubungan dengan bantuan-bantuan ketika ada kumpul ya saya ikut kumpul, terima nya saya dapat bantuan, sangat bersyukur.”

Melihat kondisi nyata seperti demikian, memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat masih mengingkan adanya keuntungan yang didapat dari pemerintah desa, sehingga belum sepenuhnya terbentuk

emauan dan kesadaran untuk bisa keluar dari keadaan yang terbatas. Disisi lain, masyarakat juga mengandalkan pemerintah untuk bergerak mandiri dalam mengupayakan program-program yang telah disusun secara bersama – sama sebelumnya.

3. Partisipasi masyarakat dalam Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi adalah hasil dari kebijakan penanggulangan kemiskinan yang memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat. Dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan sudah terlaksananya berbagai program. Dalam hal evaluasi ini yang menjadi rujukan evaluasi adalah salah satunya tingkat partisipasi yang belum maksimal di setiap lini kegiatan. Sehingga partisipasi ini menjadi wujud penting didalam menyukseskan kegiatan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Hasil nyata dari implementasi intervensi program dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Purworejo menunjukkan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi. Dalam hal rehabilitasi rumah tidak layak huni, masyarakat bisa ikut berpartisipasi secara kondusif, meskipun program ini memunculkan kecemburuan sosial namun yang terjadi masyarakat tetap memperlihatkan caranya dalam menerima giliran bantuan rehabilitasi tersebut. Bentuk rehabilitasi rumah tidak layak huni masyarakat juga turut membantu pemerintah desa dalam mengeksekusi bantuan tersebut di lapangan.

Intervensi program pencegahan stunting sudah terlaksana dengan baik, masyarakat pun ikut andil dalam mencanangkan program tersebut. Program yang mengusung pada hal penanggulangan kemiskinan tersebut, memperlihatkan adanya partisipasi masyarakat yang cukup baik. Sebelumnya memang sudah terdapat koordinasi dan komunikasi dalam program ini sehingga masyarakat Desa Purworejo juga memenuhi iktikad baik desa dalam menuntaskan masyarakat dari

penyakit stunting, yang mana penyakit stunting ini jika tidak diatasi juga akan berdampak pada ekonomi keluarga.

Selanjutnya pada program pembangunan infrastruktur, pada evaluasi ini telah disampaikan bahwa partisipasi yang dibangun dalam hal ini kurang begitu baik. Pasalnya anggaran dana desa yang belum bisa menyelimuti seluruh pembangunan infrastruktur desa, membuat masyarakat enggan untuk ikut campur. Termasuk pada pembangunan jalan kampung yang betul-betul memunculkan kritikan dari masyarakat, hal ini dikarenakan pembangunan jalan kampung yang tergenang air belum mendapatkan perhatian dari pemerintah desa, sehingga masyarakat berinisiatif untuk melakukan swadaya sendiri melalui iuran warga kampung.

Jambanisasi ini merupakan instrument penting yang juga dibahas dalam proses evaluasi. Pasalnya program jambanisasi ini juga memunculkan kecemburuan sosial bagi masyarakat. Sehingga hal ini menjadi bahan bagi pemerintah desa untuk periode kedepannya dalam menambah jumlah jamban untuk rumah tangga kurang mampu. Terlaksananya bantuan pembiayaan kemiskinan ini juga menjadi fokus yang dibahas dalam evaluasi yang mana pembiayaan kemiskinan ini mendapatkan masukan dari masyarakat untuk tepat sasaran. Adapun partisipasi masyarakat sendiri dalam proses pembiayaan kemiskinan sangat partisipatif.

Hasil daripada evaluasi partisipasi masyarakat akan dijadikan acuan dan juga bahan bagi tim penyusun kebijakan dalam merumuskan program kedepannya. Maka dapat disimpulkan dalam konsep evaluasi bahwa jika masyarakat banyak yang berpartisipasi secara aktif dan dapat gotong royong menuntaskan permasalahan kemiskinan, maka angka indeks kemiskinan akan menurun. Melihat potensi kemiskinan yang dapat naik ini merupakan masalah yang serius yang

perlu dicarikan solusi secara tepat melalui pengambilan keputusan yang telah disepakati secara bersama. Peran masyarakat yang penting ini juga menjadi salah satu terciptanya adanya sebuah awal mula kesejahteraan itu dapat terbangun.

B. Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Hasil analisis tingkatan partisipasi menjelaskan pada tingkatan partisipasi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Tingkatan partisipasi masyarakat didasarkan atas indikator penelitian dari teori Sherry R. Arnstein (1969) yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Adapun pada masyarakat Desa Purworejo sebagaimana data yang diperoleh kondisinya sebagai berikut.

Pada tingkatan ini terbagi menjadi 3 tingkatan partisipasi yaitu, *non participation*, *tokenism*, dan *citizen power*. Adapun analisis tingkatan partisipasi akan di selaraskan dengan berdasarkan pada data lapangan.

1. Non – participation

Klasifikasi tingkatan partisipasi menurut teori Arnstein adalah *Non participation* atau tidak ada partisipasi meliputi beberapa tangga partisipasi yaitu Manipulasi dan Therapy.

a. Manipulasi

Tingkatan ini merupakan tingkatan dimana pemerintah desa hanya memakai makna partisipasi sebagai pemenuhan program. Artinya masyarakat desa Purworejo yang hadir dalam forum kurang mengetahui maksud dan tujuan pertemuan tersebut. Mereka cenderung datang untuk mengetahui bahwa ada informasi penting yang disampaikan oleh pemerintahan desa. Sebenarnya, masyarakat sudah diberikan kesempatan untuk lebih interaktif dalam forum yang diadakan oleh pemerintahan desa atau pihak terkait. Hanya saja, masyarakat cenderung memilih untuk pasif.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Khunainah bahwa,

“Ketika saya dapat undangan baik dari desa maupun undangan RT RW sebagai masyarakat saya cenderung mengikuti alur rapat saat di ruangan. Saya menghormati perintah tersebut jadi saya luangkan untuk datang meskipun hanya mendapatkan informasi atas apa yang telah saya hadiri tersebut. Kalau saya mau berbicara juga saya juga kurang begitu menguasai saat rapat mbak. Jadi ya itu tadi saya ibarat notulen yang kemudian saya laporkan ke ketuanya”.

Selanjutnya menurut Ibu Umi menyatakan bahwa

“Partisipasi masyarakat murni dari kemauan masyarakat untuk hadir tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jadi kalau dapat undangan ya datang saja mbak kalau tidak ya berarti untuk orang lain. Kalau saya sendiri biasanya diundang ketika ada rapat berkaitan dengan kegiatan pelatihan-pelatihan”

Sejalan dengan apa yang telah diuraikan diatas bahwa di Desa Purworejo terdapat partisipasi masyarakat, meskipun bersifat *non* interaktif akan tetapi masyarakat masyarakat memiliki kesadaran untuk hadir saat mendapatkan undangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat yang ada di desa purworej tidak termasuk dalam kategori manipulasi, sebagaimana bukti data dari masyarakat bahwa mereka hadir meskipun cenderung pasif.

b. Terapi

Pada tingkatan ini pemerintah desa melibatkan masyarakat, namun yang terjadi masyarakat hanya memenuhi undangan. Artinya masyarakat hadir karena adanya ajakan dari pemerintah. Namun pada faktanya, masyarakat cenderung pasif karena

masyarakat menganggap bahwa masyarakat tidak memiliki kemampuan dalam menyampaikan usulan. Sehingga dalam forum tersebut masyarakat hanya dapat mendengarkan informasi yang ada.

Selaras dengan itu Bapak Ahmadi juga menyatakan bahwa

“Dalam musyawarah atau rapat tingkat desa biasanya yang berkesempatan untuk menyampaikan sesuatu itu dari tokoh-tokoh masyarakat atau yang dipandang memiliki kemampuan dibidangnya, seperti ketua BPD, ketua PKK, dan banyak lagi. Kalau saya sendiri biasanya dapat undangan meskipun hanya sebatas perwakilan dari kelompok nelayan, akan tetapi jika ada usulan dari teman-teman kelompok nelayan biasanya saya menyampaikan, kalau tidak ada ya saya cenderung mendengarkan saja”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mengukur partisipasi masyarakat di Desa Purworejo dengan kategori *non participation* bahwa penulis tidak menemukan adanya manipulasi dan terapi. Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk ikut serta mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan memutuskan program kerja kedepannya. Meskipun hadirnya masyarakat belum maksimal dan hanya sedikit yang berpartisipasi, akan tetapi pemerintah desa tetap melibatkan dengan memberikan informasi yang jelas.

2. Tokenism

˘ Pada tingkatan tokenism ini terjadi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Implementasinya melalui beberapa tingkatan meliputi Informasi, Konsultasi, dan Penentraman.

a. Informasi

Pada tahapan informasi ini terjadi komunikasi antara pemerintah desa dan juga masyarakat. Komunikasi yang dijalankan adalah komunikasi satu arah yang dilakukan oleh pemerintahan desa, seperti memberi pengumuman saat akan dilaksanakan sosialisasi atau pelatihan. Pengumuman tersebut disampaikan melalui pertemuan rutin yang dilaksanakan di setiap RT atau RW di kelurahan. Sementara inovasi penyampaian informasi melalui media lain seperti leaflet, pamflet, ataupun media sosial sudah terlaksana dengan baik oleh pemerintah Desa Purworejo. Masyarakat cukup partisipatif dalam kegiatan yang diinformasikan oleh pemerintah desa meskipun aspirasi publik tidak semuanya dieksekusi.

b. Konsultasi

Tingkatan selanjutnya pada tingkatan tokenism adalah konsultasi. Pada tahap ini masyarakat Desa Purworejo melaksanakan komunikasi dua arah berkaitan dengan permasalahan maupun program kerja yang telah dilaksanakan di masyarakat. Hal ini selain digunakan untuk mengetahui perkembangan program kerja yang dilaksanakan, juga dapat mengevaluasi program yang telah dilaksanakan. Pertemuan ini dilakukan oleh pihak terkait yang mendukung penanggulangan kemiskinan di desa Purworejo. Pada tahap ini masyarakat diundang agar bisa mengikuti kegiatan untuk berbagi pendapat, meskipun pada akhirnya pendapat tersebut masih melalui pengelolaan oleh panitia kegiatan atau melalui pemerintah desa didalam menentukan arah kebijakan.

Tingkatan konsultasi tidak terjadi di Desa Purworejo cenderung, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor. Salah satunya sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Purworejo sangat diperhitungkan oleh pemerintah desa.

Selain itu, pertemuan yang dilaksanakan biasanya berupa mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *stakeholders* sudah mengarah pada memenuhi kebutuhan hak masyarakat miskin. Sehingga hal ini berdampak pada penurunan indeks kemiskinan di Desa Purworejo.

c. Penentruman

Tangga tertinggi pada tingkat tokenism adalah penentruman. Pada tingkatan ini pemerintah memang melibatkan masyarakat dalam untuk menjadi komite dalam pelaksanaan program. Namun, hak pemutusan kebijakan tetap berada di tangan pemegang kekuasaan yaitu pemerintahan desa. Pemerintah Desa Purworejo memberikan peluang bagi masyarakat untuk bergabung dalam segala kegiatan melalui pembentukan komite, karena pada posisi tersebut masyarakat memiliki kedudukan yang relatif rendah dibandingkan dengan pemerintah yang mampu mempengaruhi keputusan. Komite-komite yang dijalankan pemerintah Desa Purworejo adalah LKMD, KPMD, dan juga PKK. Meskipun komite tersebut diberikan kebebasan dalam pemberian ide dan penyampaian aspirasi, hanya saja keputusan akhir mengenai kebijakan tersebut kembali ke pemangku jabatan tertinggi atau pihak pemegang kekuasaan.

Berdasarkan hasil penelitian tingkat tokenism oleh Arnstein yang dilaksanakan di Desa Purworejo Kabupaten Demak. Dapat disimpulkan bahwa dalam perumusan dan pelaksanaan program, pemerintah desa telah melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, BPD, TP PKK, Karang Taruna, LKMD, KPMD dan masyarakat Desa Purworejo. Pemerintah Desa Purworejo selalu melakukan sosialisasi disetiap ada kegiatan, pada kesempatan tersebut masyarakat menyampaikan pendapatnya dan masyarakat dicolek dalam mengusulkan program. Tingkatan ini sudah

terrealisasikan di desa. Namun tingkatan tersebut belum bekerja secara maksimal, hanya saja point dalam tingkatan tersebut hanya berusaha untuk diwujudkan, meskipun arah dan kebijakan masih tetap berada pada pemangku kepentingan.

3. *Degree of citizen power*

a. Kemitraan

Kemitraan adalah masyarakat berhak berunding dengan pengambilan keputusan atau adanya kekuasaan yang dibagi dengan masyarakat. Selanjutnya akan ada kesepakatan diantaranya keduanya untuk dapat mengambil sebuah kebijakan yang ada. Pada tingkatan ini masyarakat Desa Purworejo telah melaksanakan upaya kemitraan dengan baik walaupun hasil yang didapatkan belum mencapai taraf maksimal. Upaya kemitraan yang dilaksanakan sejauh ini melalui Karang Taruna dan PKK sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh mitra terkait. Selain itu pemerintah desa juga menggandeng lembaga daerah untuk membantu menjalankan program yang belum bisa diatasi oleh pemerintah desanya. Sehingga kemitraan yang dibangun pada Desa Purworejo ini terfokus pada lembaga masyarakat dan lembaga dinas kedaerahan yang memiliki tupoksi selaras dengan kebutuhan kemitraan Desa Purworejo.

b. Delegasi Kekuasaan

Pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan wewenang di dalam membuat kebijakan yang ada di Desa Purworejo. Dimana masyarakat dapat bernegosiasi dengan pemerintah desa. Sehingga kemudian masyarakat mempunyai kekuatan untuk mengendalikan sebuah keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat Desa Purworejo berupaya dengan baik menjadi partisipan yang aktif dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Purworejo. Seperti halnya masyarakat Desa Purworejo berusaha

mengasosiasikan mata pencahariannya bersama-sama sehingga dapat berkembang dengan baik melalui trik ataupun informasi pengetahuan. Dengan demikian pula, pemerintah telah memberikan kewenangannya kepada masyarakat Purworejo untuk mengurusinya yang muaranya akan berdampak ke dalam pengentasan permasalahan kemiskinan.

c. Pengawasan Masyarakat

Penagawasan masyarakat merupakan dimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengendalikan segala proses yang ada di dalam ruang pengambilan keputusan atau forum. Dan masyarakat memiliki kekuatan penuh di dalam melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah bentuk transformasi menuju ke arah yang lebih baik lagi.

Masyarakat Desa Purworejo dalam tingkatan ini belum secara penuh membangun inisiasi didalam mengendalikan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sejalan dengan kondisi permasalahan yang ada, masyarakat dalam tahap pengawasan ini masih kurang. Dimana masyarakat belum sepenuhnya mengawal kegiatan baik dalam pengambilan kebijakan maupun pada pelaksanaannya. Masyarakat Desa Purworejo sendiri menganggap mereka adalah orang kecil yang kurang begitu memiliki suara didalam mempengaruhi keputusan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan masyarakat belum begitu optimal didalam mengawasi segala kegiatan yang ada di Desa Purworejo. Partisipasi masyarakat yang ada di Desa Purworejo belum begitu maksimal didalam mendorong aksi nyata kebijakan penanggulangan kemiskinan

Dalam tingkatan *Degree of citizen power* masyarakat di Desa Purworejo tergolong dalam tingkatan kemitraan. Dimana Pemerintah Desa Purworejo telah menjalin kerja sama dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya yang ada di Desa Purworejo untuk

sama-sama berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan. kemitraan ini adalah bentuk dukungan masyarakat atas program yang telah disepakati secara bersama.

Secara keseluruhan dengan melihat indikator tangga partisipasi dari teorinya Arnstein yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2021 termasuk ke dalam tingkatan kemitraan. Kemitraan ini pemerintah desa telah membangun konsep partisipasi dengan bermitra kepada lembaga kemasyarakatan seperti KPMD, LKMD, TP.PKK, Karang Taruna, Kelompok Nelayan, RT RW,BPD, dan lembaga lainnya. Pemerintah desa dan lembaga lainnya aktif dalam memelopori kegiatan untuk menanggulangi kemiskinan. Wujud kemitraannya adalah pemerintah desa dan lembaga masyarakat serta masyarakat biasa bekerja sama dalam menjalankan program kegiatan penanggulangan kemiskinan. bentuk kerja samanya adalah mendukung kegiatan berupa tenaga, materil, maupun bantuan lainnya yang bersifat membangun dalam merealisasikan program kebijakan yang telah disepakati secara bersama dalam proses awal perencanaan kebijakan.

Adapun kenaikan angka kemiskinan yang terjadi di Desa Purworejo di pengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yaitu meliputi :

1. Faktor Eksternal

Dalam penentuan rumusan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan diikuti oleh *stakeholders*. *Stakeholders* memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan. Namun yang terjadi disini adalah peran *stakeholders* masih mendominasi dalam kegiatan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Uniknya dengan adanya dominasi para stakeholder tersebut, mereka membuat MoU sebagai landasan atas dominasinya dalam menentukan segala keputusan, meskipun memang pada dasarnya juga tergolong partisipatif,

namun tetap saja segala keputusan yang ada akan diuji kembali oleh tim dari unsur desa. Sehingga wujud kemitraan ini kadang kurang begitu maksimal dalam membangun kerja sama dengan masyarakat.

2. Faktor Internal

Pertama adalah faktor Pendidikan dan pengetahuan, keadaan ini masih tergolong rendah bagi Desa Purworejo, munculnya statemen bahwa keterlibatan mereka tidak mempengaruhi adanya sebuah kebijakan akhir. Bahkan masyarakat berpikir kondisi kemiskinan yang sangat dekat dengan kehidupannya adalah hal biasa. Sehingga masyarakat juga beranggapan tidak perlu memperjuangkan agar keluar dari kemiskinan. namun bagi pemerintah desa sendiri telah mencarikan solusi dengan membuat perjanjian secara tertulis dalam bermitra dengan masyarakat.

Kedua, pekerjaan masyarakat yang mayoritas adalah nelayan, tentunya pekerjaan ini menyita banyak waktu sehingga masyarakat belum bisa berpartisipasi secara maksimal. Adapun partisipasi pada dasarnya selalu ada di dalam setiap intervensi kegiatan penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi kembali lagi kepada jenis program yang dijalankan. Sehingga faktor pekerjaan ini pun menjadi alasan bagi masyarakat dalam berpartisipasi yang begitu kurang maksimal.

Ketiga, Pola pikir yang terbentuk diwilayah pesisir belum berorientasi pada masa depan atau masa yang akan datang. Berdasarkan data yang didapat dari lapangan, menunjukkan bahwa masyarakat hidup dengan caranya sendiri, sehingga berbagai program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah Desa Purworejo belum diterima secara responsif oleh masyarakat sehingga hal inilah yang memunculkan adanya kecemburuan sosial, akibatnya partisipasi inilah yang

tampak hanya orang-orang yang bersangkutan saja. Sehingga adanya hal ini juga membuat masyarakat enggan untuk bertegur sapa dengan warga, alhasil berdampak pula pada kehidupan masyarakat dari segi ekonomi.

Selanjutnya adalah kondisi desa, ini menjadi faktor dalam membentuk partisipasi, keadaan wilayah desa yang kurang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara penuh dipengaruhi oleh jarak antar dukuh/dusun dan jarak ke balai desa yang lumayan jauh, sehingga memunculkan persepsi masyarakat rasa malas untuk datang. Apalagi ditambah dengan akses jalan yang terkena banjir rob ini juga melatarbelakangi tingkat prosentase masyarakat untuk ikut andil.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dituangkan ke dalam Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Purworejo Tahun 2021. Adapun bentuk penanggulangan kemiskinan di Desa Purworejo sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RKP Desa adalah melalui intervensi program yang bersifat multidimensional, seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, jambanisasi, pencegahan penyakit stunting, pembangunan infrastruktur, dan bantuan pembiayaan kemiskinan.

Adapun partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan jika dilihat dari tangga partisipasi menurut Arnstein, partisipasi yang ada di Desa Purworejo ini termasuk kepada tingkatan *Degree of citizen Power* dalam wujud kemitraan. Hal ini dibuktikan dengan segala kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tertuju pada masyarakat, Pemerintah Desa membangun kemitraan/ kerja sama dengan masyarakat, termasuk juga menjalin kemitraan dengan lembaga terkait. Sehingga kemitraan ini menjadi hal utama yang dibangun pemerintah desa dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

B. Saran

Untuk kedepannya partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan lagi agar suatu kebijakan yang telah ditetapkan dapat terealisasi secara maksimal sehingga bisa mencapai tingkatan *Degree of Citizen Power* dalam wujud pengawasan masyarakat dan untuk Pemerintah Desa agar bisa memberikan payung hukum masyarakat dalam setiap satu permasalahan yang ada, sehingga dalam menyelesaikan permasalahan bisa lebih fokus, terstruktur dan terarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Affan, I. (2020). Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah . *Jurnal Ilmu Hukum*, 137.
- Bambang Noorsetya, dkk. (2020). Sosial Inclution dan Penguatan Kelembagaan Sosial dalam Otonomi Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan. *Jurnal Penelitian*, 7.
- Hamdi, M. (2015). *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi* . Bogor: Galia Indonesia.
- Hermawati, I. (2012). Dampak Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 145.
- Jundi, M. A. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi Di Indonesia. *Skripsi*.
- Khalil, J. (2010). *Jihad Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Lilin Apriyani, Dikdik Baehaqi . (2019). Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. *Jurnal Citizenship*, 64.
- Mufid Zuhri, Arif Sofianto. (2020). Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah, Indonesia. *Jurnal PKS*, 292.
- Mulyadi, M. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Nadi Pustaka.
- Muttaqien, A. (2006). Paradigma Baru Pemberantasan Kemiskinan, Rekonstruksi Arah Pembangunan Menuju Masyarakat yang Berkeadilan, Terbebaskan, dan Demokratis . *Khanata Pustaka LP3ES*, 3.
- Nadilla, S. (2019). Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia . *Jurnal HAM*, 96.

- Papilaya, J. (2020). Kebijakan Publik dalam Pengentasan Kemiskinan (Suatu Kajian Peranan Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan). *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 91.
- Prawoto, N. (2009). Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 66.
- Rosikhan. (2021). *Angka Kemiskinan di Demak Naik 12,54 Persen*. Demak: suaramerdeka.com.
- Sherry, A. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation . *Journal Of The American Planning Association* , 126.
- Sueweno, I. (1998). *Melepas Simpul Kemiskinan* . Jakarta : Intisari Kebijakanaksanaan Menteri Sosial RI Kabinet Pembangunan IV.
- Sugiyono. (2010). *Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND* . Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sukmaraga, P. (2011). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per Kapita, dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah. *Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*, 2.
- Usman, Husaini. Purnomo Setiady Akbar. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zamhariri. (2008). Pengembangan Masyarakat : Perspektif Pemberdayaan dan Pembangunan . *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 103.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Jalan Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
 Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 714/Un.10.6/K/KM.05.01/03/2022
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Semarang, 29 Maret 2022

Yth.
 Kepala Desa Purworejo
 di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Analisis Partisipasi Publik dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2021" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Alfina Rosdiana
 NIM : 1806016058
 Semester : VIII (delapan)
 Jurusan : Ilmu Politik
 Tempat/ Tgl lahir : Demak, 1 April 2000
 CP/e-mail : 081325709482 - finadiana7@gmail.com
 Nama Ayah/ Ibu : Suhirman
 Pekerjaan : Guru
 Alamat : Ds.Mutih Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



H. A. Gunawan, S.Ag, M.H

Terbusan :
 Dekan FISIP UIN Walisongo

Lampiran 3. Informan Penelitian

No	Nama	Pekerjaan	Alamat
1.	Ahmad Saifullah Al Asadul Usud	Kepala Desa	Kongsi
2.	Agus	Pendamping Desa	-
2.	Musthofa	Guru	RT 2/RW 7
3.	Solekhah	Buruh ikan	RT 3/RW 2
4.	Fakhrus	Anggota BPD	RT 8/RW 3
5.	Maftukhin	Ketua LKMD	RT 3 / RW 7
6.	Umi	Ketua RT	RT 2 / RW 3
7.	Khunainah	Buruh Ikan	RT 3 / RW 2
8.	Siti Maghfiroh	Buruh Ikan	RT 8 / RW 1
9.	Kusniyah	Ibu Rumah Tangga	RT 10/ RW 2
10.	Ahmadi	Nelayan	RT 4 / RW 1

Lampiran 3. Draft Wawancara

Lampiran

1. Wawancara dengan Kepala Desa Purworejo

Nama : Ahmad Saifullah Al Asadul Usud

Waktu Wawancara : Senin, 11 April 2022, pukul 11.27 WIB.

- Penulis : Apakah anda mengetahui kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan ?
- Pak Usud : Iya mengetahui, sudah ada rapatnya dari pemerintah desa dengan masyarakat miskin termasuk pula kita melibatkan pemangku kepentingan dari kecamatan. Kita rapatkan dalam forum musyawarah sehingga dalam rapat tersebut penanggulangan kemiskinan pada tahun 2021 berpedomann pada RPJM Des yang telah ditetapkan.
- Penulis : Menurut anda apakah kebijakan RPJMDes sudah mencakup arah dalam menanggulangi kemiskinan ?
- Pak Usud :Sudah, melalui beberapa program saya telah berusaha mengoptimalkan agar tercapainya masyarakat yang sejahtera
- Penulis : Apakah peraturan penanggulangan kemiskinan diketahui oleh masyarakat ?
- Pak Usud : Iya diketahui masyarakat, meskipun tidak semua masyarakat, namun informasi mengenai kebijakan tersebut telah disampaikan oleh perwakilan masyarakat yang ikut andil
- Penulis : Apakah masyarakat diberikan ruang dalam menyampaikan usul, ide dan gagasan dalam kebijakan menanggulangi kemiskinan ?
- Pak Usud :Iya tentu saja, kami pemerintah desa sangat terbuka bagi masyarakat dalam menyampaikan usulan. Contohnya pada tahun 2021 kemarin terdapat pelaksanaan program yang

diusulkan masyarakat dalam pembangunan jalan kampung. Sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJM Des bahwa strateginya di arahkan melalui peningkatan pembangunan baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi.

- Penulis : Menurut anda bagaimana sejarah kemiskinan yang ada di Desa Purworejo ?
- Pak Usud : Untuk sejarah kemiskinan sendiri, desa purworejo awalnya merupakan desa tertinggal karena wilayah desanya yang terpinggirkan dan jauh dari pusat kota sehingga ini menjadi keterbatasan masyarakat dalam mengakses apapun. Kemudian desa tertinggal berubah menjadi desa miskin dan bertransformasi menjadi desa berkembang. Namun semenjak wabah covid melanda juga memicu meningkatnya angka kemiskinan, akan tetapi secara menyeluruh kemiskinan ini diakibatkan oleh masalah-masalah yang begitu kompleks yang terjadi di desa ini'
- Penulis : Apakah ada operasional secara khusus dalam pembiayaan penanggulangan kemiskinan ?
- Pak Usud : Tentu ada, biaya operasional penanggulangan kemiskinan kita arahkan pada bentuk pemberdayaan dan bantuan – bantuan bagi masyarakat miskin
- Penulis : Sejauh mana partisipasi dari masyarakat sendiri untuk berperan dalam pengentasan kemiskinan ?
- Pak Usud : Partisipasi masyarakat bisa berupa kehadiran dalam penyusunan RKP Desa Tahun 2021, pelaksanaan implementasi program, dan kegiatannya lainnya termasuk pada kegiatan musyawarah dusun.
- Penulis : Apakah partisipasi yang anda berikan berpengaruh didalam forum musyawarah ?

- Pak Usud : Ya, apa yang saya sampaikan dapat ditampung didalam forum dan kemudian dapat diolah lebih lanjut
- Penulis : Bagaimana solusi yang anda tawarkan dalam menuntaskan kemiskinan?
- Pak Usud : Saya sebagai kepala desa mengajak seluruh masyarakat untuk aktif membahas apa saja yang kiranya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Termasuk juga pemerintah desa juga fokus dalam peningkatan kualitas masyarakat melalui pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan. Sehingga hal-hal tersebut juga akan berpengaruh pada kondisi desa baik kondisi pendidikannya, lingkungannya, dan lainnya.

2. Wawancara dengan Pendamping Desa

Nama : Bapak Agus

Waktu wawancara : Selasa, 12 April 2022, pukul 13.00 WIB

- Penulis : Apakah anda mengetahui kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan ?
- Pak Agus : iya mengetahui, kebijakan penanggulangan kemiskinan tertuang ke dalam rencana kerja desa
- Penulis : Apakah anda mengetahui kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan ?
- Pak Agus : kebijakan penanggulangan kemiskinan di desa sangat banyak
mbak, diantaranya mengadakan pemberian bantuan berupa sembako, rumah layak huni, dan membangun beberapa fasilitas bagi masyarakat miskin
- Penulis : Menurut anda apakah kebijakan RPJMDes sudah mencakup arah dalam menanggulangi kemiskinan ?
- Pak Agus :saya kira sudah, meskipun tidak ada kebijakan secara khusus yang dibuat desa namun kebijakan tersebut saya kira sudah

dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan mengurangi angka kemiskinan

- Penulis : Apakah peraturan penanggulangan kemiskinan diketahui oleh masyarakat?
- Pak Agus : sudah, namun secara detailnya hanya beberapa orang yang mengetahuinya mungkin hanya bagi mereka yang mendapatkan bantuan atas program kebijakan yang dibuat desa
- Penulis : Apakah masyarakat diberikan ruang dalam menyampaikan usul, ide dan gagasan dalam kebijakan menanggulangi kemiskinan ?
- Pak Agus : iya diberikan ruang, mereka memanfaatkan dengan membahas kegiatan termasuk kegiatan atau program program yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat
- Penulis : Menurut anda bagaimana sejarah kemiskinan yang ada di Desa Purworejo?
- Pak Agus : sejarah kemiskinan ceritanya panjang, singkatnya kemiskinan ini terjadi karena pola hidup masyarakat yang tidak beraturan. Artinya masyarakat hidup secara konsumtif yang memang berdampak pada kemiskinan yang terus menerus.
- Penulis :Apakah ada operasional secara khusus dalam pembiayaan penanggulangan kemiskinan ?
- Pak Agus : pembiayaan penanggulangan secara khusus tidak ada, namun upaya pembiayaan itu digabungkan dengan rencana kerja strategis pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan
- Penulis : Sejauh mana partisipasi dari masyarakat sendiri untuk berperan dalam pengentasan kemiskinan ?
- Pak Agus : partisipasi masyarakatnya cukup baik, artinya mereka hadir ketika mendapatkan ajakan atau seruan dari para perangkat desa ataupun tingkatan di atasnya.

- Penulis : Bagaimana solusi yang anda tawarkan dalam menuntaskan kemiskinan?
- Pak Agus : Solusinya sederhana yaitu membentuk kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga lainnya untuk sama-sama fokus menyelesaikan permasalahan tersebut.

3. Wawancara dengan Ketua LKMD

Nama : Maftukhin

Waktu wawancara : Sabtu, 16 April 2022, pukul 10.00 WIB

- Penulis : Apakah anda mengetahui kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan ?
- Pak Maftukhin : Ya saya mengetahui, kebijakan penanggulangan kemiskinan di desa purworejo di wujudkan dalam bentuk pembiayaan bantuan dan program-program lainnya.
- Penulis : Menurut anda apakah kebijakan RPJMDes sudah mencakup arah dalam menanggulangi kemiskinan ?
- Pak Maftukhin : sudah, dilihat dari pembangunan-pembangunan yang pada umumnya di orientasikan kepada akses bagi masyarakat untuk lebih mudah memenuhi kebutuhan
- Penulis : Apakah peraturan penanggulangan kemiskinan diketahui oleh masyarakat?
- Pak Maftukhin : sudah, namun tidak semua mengetahui. Mungkin hanya beberapa program saja yang mereka ketahui
- Penulis : Apakah masyarakat diberikan ruang dalam menyampaikan usul, ide dan gagasan dalam kebijakan menanggulangi kemiskinan ?
- Pak Maftukhin : untuk usulan ide ataupun gagasan, biasanya ada contohnya ada rapat di tingkat dusun, rapat di tingkat desa. Hal tersebut juga merupakan bentuk ruang yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakatnya, termasuk saya sebagai ketua LKMD juga sering menyampaikan sesuatu saat acara

berlangsung

- Penulis :Menurut anda bagaimana sejarah kemiskinan yang ada di Desa Purworejo?
- Pak Maftukhin :Sejarah kemiskinan di Desa Purworejo sendiri tidak luput dari letak desanya yang terpiggirkan, dalam artian memang lokasinya yang jauh dari pusat kota. Sehingga segala akses pun mengalami keterbatasan. Termasuk pada bencana air rob yang memprihatinkan menjadi faktor kemiskinan yang ada.
- Penulis :Sejauh mana partisipasi dari masyarakat sendiri untuk berperan dalam pengentasan kemiskinan ?
- Pak Maftukhin :partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKP yang diundang itu hanya perwakilan saja, jadi partisipasinya ya ditentukan oleh desa. Tapi untuk diluar tersebut, partisipasi masyarakat masih harus dicolek oleh pemerintah desanya untuk gerak.
- Penulis :Apakah partisipasi yang anda berikan berpengaruh didalam forum musyawarah ?
- Pak Maftukhin :iya saya sebagai ketua LKMD memiliki pengaruh dalam membawa gerak masyarakat. Apalagi di desa ini hanya beberapa lembaga kemasyarakatan yang aktif.
- Penulis :Bagaimana solusi yang anda tawarkan dalam menuntaskan kemiskinan?
- Pak Maftukhin :kalau menurut saya solusinya ya adanya pembiayaan yang mencukupi

4. Wawancara dengan Anggota BPD

Nama : Fakhrus

Waktu Wawancara : Senin, 11 April 2022, pukul 11.27 WIB.

- Penulis :Apakah anda mengetahui kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan ?
- Pak Fakhrus :iya mengetahui

- Penulis :Menurut anda apakah kebijakan RPJMDes sudah mencakup arah dalam menanggulangi kemiskinan ?
- Pak Fakhrus :kebijakan mengurangi angka kemiskinan saya kira sudah termuat dalam kebijakan desa dan tentu itu sudah mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Artinya hal itu juga mencakup pada aspek penanggulangan kemiskinan
- Penulis :Apakah peraturan penanggulangan kemiskinan diketahui oleh masyarakat?
- Pak Fakhrus :iya diketahui
- Penulis :Apakah masyarakat diberikan ruang dalam menyampaikan usul, ide dan gagasan dalam kebijakan menanggulangi kemiskinan ?
- Pak Fakhrus :sangat, masyarakat diberikan ruang terbuka baik secara mandiri maupun dengan melibatkan pemerintah desa atau BPD
- Penulis :Menurut anda bagaimana sejarah kemiskinan yang ada di Desa Purworejo?
- Pak Fakhrus :sejarah kemiskinan sendiri itu lahir dari kondisi wilayah yang kurang memungkinkan, apalagi ditambah dengan jumlah penduduk yang sangat padat, sehingga kemiskinan itu terus saja ada. Termasuk juga diakibatkan oleh pandemi covid yang secara tidak langsung juga memberikan pengaruh pada kondisi kemiskinan yang semakin parah.
- Penulis :Apakah ada operasional secara khusus dalam pembiayaan penanggulangan kemiskinan ?
- Pak Fakhrus :Kalau untuk pembiayaan biasanya ada dan sudah dijelaskan ditransparansi pendapatan dan pengeluaran anggaran APBDes
- Penulis :Sejauh mana partisipasi dari masyarakat berperan dalam pengentasan kemiskinan ?
- Pak Fakhrus :peran masyarakat cukup baik, mereka mampu mengikuti

- segala arahan dari desa
- Penulis :Apakah partisipasi yang anda berikan berpengaruh didalam forum musyawarah ?
 - Pak Fakhrus :pengaruh BPD sangat penting dalam membawa arah kebijakan yang dibahas, sehingga apa saja yang berkaitan dengan masyarakat, maka BPD akan terlibat
 - Penulis :Bagaimana solusi yang anda tawarkan dalam menuntaskan kemiskinan?
 - Pak Fakhrus :untuk solusinya sendiri perlu dibuat kebijakan yang tertera secara khusus dalam menanggulangi kebijakan. Sehingga pendanaan dalam pembiayaan penanggulangan kemiskinan lebih jelas dan akuntabel

5. Wawancara dengan Kaur Perencanaan Pembangunan

- Nama : Adis Rohmatullah
- Waktu wawancara : Kamis, 14 April 2022, pukul 13.00 WIB
- Penulis :Apakah anda mengetahui kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan ?
 - Pak Adis :iya mengetahui, kebijakan nya dibuat dalam rumusan yang telah ditetapkan saat musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pada saat itu, forum akan memetakan permasalahan yang ada di desa purworejo sehingga kemudian muncul masalah kemiskinan yang kemudian dibuatkan kebijakan berkaitan dengan kemiskinan
 - Penulis : Apakah anda mengetahui kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan ?
 - Pak Adis : kebijakan nya sendiri di selaraskan dengan kebijakan pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi.
 - Penulis : Menurut anda apakah kebijakan RPJMDes sudah mencakup arah dalam menanggulangi kemiskinan ?
 - Pak Adis :Menurut saya sudah, karena apa aja yang di rumuskan

- tersebut di prioritaskan bagi kesejahteraan masyarakat
- Penulis : Apakah peraturan penanggulangan kemiskinan diketahui oleh masyarakat?
 - Pak Adis : iya diketahui
 - Penulis : Apakah masyarakat diberikan ruang dalam menyampaikan usul, ide dan gagasan dalam kebijakan menanggulangi kemiskinan ?
 - Pak Adis : iya diberikan ruang dalam menyampaikan usulan, biasanya mereka menyampaikan usulan di sampaikan ke RT atau RW
 - Penulis : Menurut anda bagaimana sejarah kemiskinan yang ada di Desa Purworejo?
 - Pak Adis : sejarah kemiskinan menurut saya kemiskinan sudah ada sejak lama disini, berdasarkan ceritanya atau memang faktanya bahwa desa purworejo merupakan desa terbelakang dan terpinggirkan sehingga desa ini menjadi desa tertinggal kemudian berubah menjadi desa miskin dan sekarang sedang merangkak menjadi desa berkembang
 - Penulis : Apakah ada operasional secara khusus dalam pembiayaan penanggulangan kemiskinan ?
 - Pak Adis : pembiayaan digabungkan dalam program-program kemiskinan
 - Penulis : Sejauh mana partisipasi dari masyarakat sendiri untuk berperan dalam pengentasan kemiskinan ?
 - Pak Adis : masyarakat cenderung pasif, jadi mereka mungkin mengandalkan kinerja pemdes untuk dapat merubah situasi dan kondisi yang ada
 - Penulis : Apakah partisipasi yang anda berikan berpengaruh didalam forum musyawarah ?
 - Pak Adis : iya memberikan pengaruh, karena saya sebagai kaur perencanaan harus berperan aktif dalam memajukan pembangunan desa

- Penulis : Bagaimana solusi yang anda tawarkan dalam menuntaskan kemiskinan?
- Pak Adis : untuk solusinya, perlu dibuatkan kebijakan secara khusus dan perlu adanya pembinaan atau pendampingan mungkin dari dinas terkait agar bisa keluar dari desa yang tinggi angka kemiskinan. kalau dari internal desa sendiri sangat susah.

6. Wawancara dengan perwakilan Kelompok Nelayan

Nama : Bapak Ahmadi (Kelompok Nelayan)

Waktu wawancara : Kamis, 14 April 2022, pukul 13.00 WIB

- Penulis : Apakah anda mengetahui kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan ?
- Pak Ahmadi : kurang tau saya mbak
- Penulis : Menurut anda apakah kebijakan RPJMDes sudah mencakup arah dalam menanggulangi kemiskinan ?
- Pak Ahmadi : kerja nya pemdes mungkin ya sudah
- Penulis : Apakah peraturan penanggulangan kemiskinan diketahui oleh masyarakat?
- Pak Ahmadi : mungkin banyak orang paham tentang peraturan itu, kalau saya sendiri saya kurang begitu paham. Mungkin kalau untuk mengatasi kemiskinan biasanya bantuan. Saya juga mendapatkan bantuan sembako
- Penulis : Apakah masyarakat diberikan ruang dalam menyampaikan usul, ide dan gagasan dalam kebijakan menanggulangi kemiskinan ?
- Pak Ahmadi : kalau kumpulan atau rapat biasanya masyarakat hadir.
- Penulis : Menurut anda bagaimana sejarah kemiskinan yang ada di Desa Purworejo?
- Pak Ahmadi : kemiskinan ada yang karena mungkin hanya sekedar pekerjaan nelayan begini ya sulit untuk menjangkau ekonomi yang stabil

- Penulis : Apakah ada operasional secara khusus dalam pembiayaan penanggulangan kemiskinan ?
- Pak Ahmadi : kurang tahu
- Penulis : Sejauh mana partisipasi dari masyarakat sendiri untuk berperan dalam pengentasan kemiskinan ?
- Pak Ahmadi : Kalau saya berpartisipasi ketika hanya mendapatkan undangan saja mbak
- Penulis : Apakah partisipasi yang anda berikan berpengaruh didalam forum musyawarah ?
- Pak Ahmadi : kurang tahu mba, yang penting dalam hadir saat rapat apa yang mau disampaikan bisa tersampaikan saat rapat meskipun disana hanya mendengarkan saja
- Penulis : Bagaimana solusi yang anda tawarkan dalam menuntaskan kemiskinan?
- Pak Ahmadi : bantuan yang lebih banyak lagi mbak

7. Wawancara dengan masyarakat

Nama : Ibu Khunainah

Waktu wawancara : Kamis, 14 April 2022, pukul 13.00 WIB

- Penulis : Apakah anda mengetahui kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan ?
- Ibu Khunainah : tidak tahu
- Penulis : Apakah anda mengetahui kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan ?
- Ibu Khunainah : tidak tahu
- Penulis : Menurut anda apakah kebijakan RPJMDes sudah mencakup arah dalam menanggulangi kemiskinan ?
- Ibu Khunainah : tidak tahu
- Penulis : Apakah peraturan penanggulangan kemiskinan diketahui oleh masyarakat?
- Ibu Khunainah : tidak tahu

- Penulis : Apakah masyarakat diberikan ruang dalam menyampaikan usul, ide dan gagasan dalam kebijakan menanggulangi kemiskinan ?
- Ibu Khunainah : kalau usulan biasanya lewat RT RW pas saat rapat
- Penulis : Menurut anda bagaimana sejarah kemiskinan yang ada di Desa Purworejo?
- Ibu Khunainah : kemiskinan paling ya karena rob itu
- Penulis : Apakah ada operasional secara khusus dalam pembiayaan penanggulangan kemiskinan ?
- Ibu Khunainah : tidak tahu
- Penulis : Sejauh mana partisipasi dari masyarakat sendiri untuk berperan dalam pengentasan kemiskinan ?
- Ibu Khunainah : partisipasi saya, ya saya hadir saat ada pembagian sembako kan itu sebagai bentuk mematuhi pak kepala desa
- Penulis : Apakah partisipasi yang anda berikan berpengaruh didalam forum musyawarah ?
- Ibu Khunainah : tidak tahu
- Penulis : Bagaimana solusi yang anda tawarkan dalam menuntaskan kemiskinan?
- Ibu Khunainah : bisa dibuatkan usaha yang dapat dikelola masyarakat secara luas

8. Wawancara dengan Ketua RT

Nama : Ibu Umi

Waktu wawancara : Kamis, 14 April 2022, pukul 13.00 WIB

- Penulis : Apakah anda mengetahui kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan ?
- Ibu Umi : kebijakan untuk mengurangi kemiskinan ya melalui bantuan bantuan dari desa seperti PKH, sembako, KIP, dll
- Penulis : Menurut anda apakah kebijakan RPJMDes sudah mencakup arah dalam menanggulangi kemiskinan ?

- Ibu Umi : sudah
- Penulis :Apakah peraturan penanggulangan kemiskinan diketahui oleh masyarakat?
- Ibu Umi :Mungkin diketahui, meskipun tidak semuanya paham apa saja point-pointnya
- Penulis :Apakah masyarakat diberikan ruang dalam menyampaikan usul, ide dan gagasan dalam kebijakan menanggulangi kemiskinan ?
- Ibu Umi : Saya kira sudah, namun kurang maksimal
- Penulis :Menurut anda bagaimana sejarah kemiskinan yang ada di Desa Purworejo ?
- Ibu Umi : kalau sejarah kemiskinan yang saya tahu ya karena memang dari dulu kondisinya seperti ini
- Penulis :Apakah ada operasional secara khusus dalam pembiayaan penanggulangan kemiskinan ?
- Ibu Umi : kurang tahu
- Penulis :Sejauh mana partisipasi anda berperan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan ?
- Ibu Umi : partisipasi dari saya sendiri saya berusaha aktif dalam pelaksanaan kegiatan
- Penulis :Apakah partisipasi yang anda berikan berpengaruh didalam forum musyawarah ?
- Ibu Umi : iya
- Penulis :Bagaimana solusi yang anda tawarkan dalam menuntaskan kemiskinan?
- Ibu Umi :dari pemerintah desa lebih bisa memahami kondisi masyarakat dan membangun dialog yang benar-benar interaktif kepada masyarakat, tidak hanya sekedar melaksanakan program saja.

10. Wawancara dengan Anggota PKK

Nama : Ibu Solekhah

Waktu wawancara : Kamis, 14 April 2022, pukul 13.00 WIB

- Penulis : Apakah anda mengetahui kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan ?
- Ibu Solekhah : iya mengetahui, sedikit banyak saya paham
- Penulis : Menurut anda apakah kebijakan RPJMDes sudah mencakup arah dalam menanggulangi kemiskinan
- Ibu Solekhah : untuk isi dari RPJMDes sendiri saya kurang tahu mbak, tapi selama ini khususnya pada tahun 2021 itu memang segala aktivitas pendapatan vakum. Termasuk pada pendampingan atau pembinaan ekonomi juga berdampak
- Penulis : Apakah peraturan penanggulangan kemiskinan diketahui oleh masyarakat?
- Ibu Solekhah : iya diketahui, karena biasanya disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan
- Penulis : Apakah masyarakat diberikan ruang dalam menyampaikan usul, ide dan gagasan dalam kebijakan menanggulangi kemiskinan ?
- Ibu Solekhah : iya diberikan
- Penulis : Menurut anda bagaimana sejarah kemiskinan yang ada di Desa Purworejo?
- Ibu Solekhah :sejarah kemiskinan yang saya ketahui bahwa kemiskinan yang ada di desa purworejo sangat memprihantinkan dan butuh perencanaan yang strategis dalam menyelesaikan masalah kemiskinan
- Penulis : Apakah ada operasional secara khusus dalam pembiayaan penanggulangan kemiskinan ?
- Ibu Solekhah : kurang tahu
- Penulis : Sejauh mana partisipasi anda untuk berperan dalam pengentasan kemiskinan ?
- Ibu Solekhah : partisipasi dari saya sendiri saya ikut mendampingi

masyarakat dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan

- Penulis : Apakah partisipasi yang anda berikan berpengaruh didalam forum musyawarah ?
- Ibu Solekhah : sangat berpengaruh, penting sekali partisipasi itu. Jika tidak ada partisipasi maka sangat sulit menuntaskan kemiskinan. di desa puroworejo sendiri partisipasi masyarakat masih sangat rendah.dibuktikan dengan pola pikir yang kurang mendukung dalam berkontribusi
- Penulis : Bagaimana solusi yang anda tawarkan dalam menuntaskan kemiskinan?
- Ibu Solekhah : seluruh masyarakat perlu digerakan untuk terlibat aktif

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi : Wawancara dengan Kepala Desa



Dokumentasi Wawancara dengan Ketua RT



Dokumentasi Wawancara Masyarakat



Wawancara dengan Masyarakat



Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat



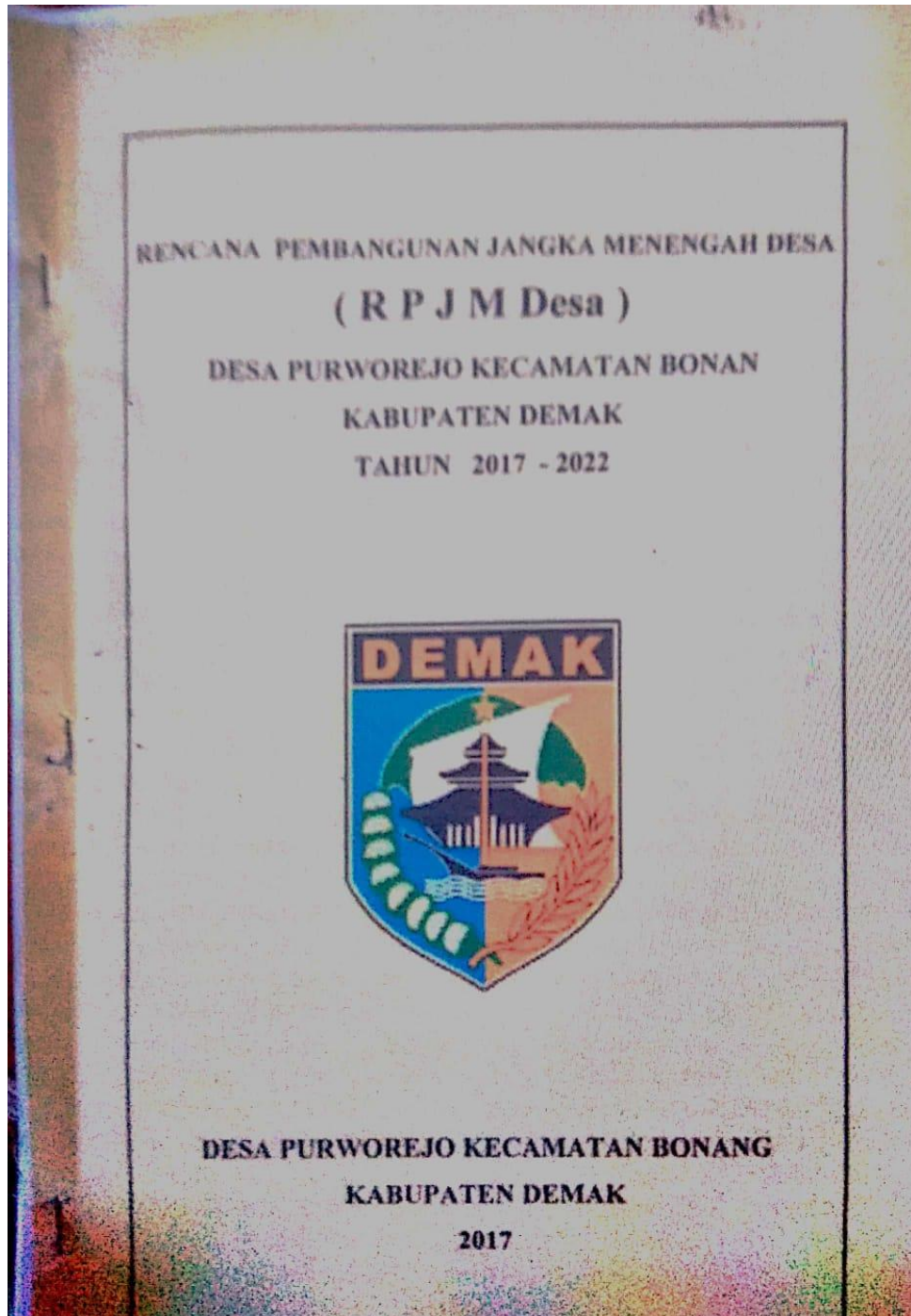
Dokumentasi wawancara dengan Anggota BPD



Dokumentasi wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Dokumentasi wawancara dengan Ketua LKMD

Lampiran 5. Dokumen RPJMDes

Lampiran 6. Tim Penyusun RPJMDes

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOREJO
 NOMOR : 146/ 01/ KEP/ DS/ I/ 2017
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2017 - 2022

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 (RPJM Desa)

TAHUN 2017 - 2022

DESA PURWOREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	2	3	4
1	AHMAD SAIFULLAH AL ASADUL USUD	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	MUNDIR ANDRIANTO, SE	Sekretaris Desa	Ketua
3	MAFTUHIN, S. Pd. I	LKMD	Sekretaris
4	TASRUCHIN	Perangkat Desa	Anggota
5	NUR HAMID	Perangkat Desa	Anggota
7	ADIS ROHMATULLAH	Perangkat Desa	Anggota
8	KHUSNIN QOMARUDI YUSUF ASRORI	KPMD	Anggota
9	SA'ADAH	KPMD	Anggota
10	ISWATI	TP. PKK	Anggota
11	SUDARTI	Bidan Desa	Anggota

Ditetapkan di : Purworejo
 Pada tanggal : 05 Januari 2017



AHMAD SAIFULLAH AL ASADUL USUD


Lampiran 7. Daftar Hadir perumusan RPJMDes

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RPJM DESA 2017 - 2021
 DESA : PURWOREJO
 KECAMATAN : BONANG
 YANGGAL : 19 JANUARI 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Abdullah Saifulloh An	Kader	
2	M. Nurul Anwar	Sek. DMC	
3	Cholil Mahid	Ket BPD	
4	Musrofa	W. BPD	
5	R. Fauziah	BPD	
6	Abdullah Sahif	Sek. BPD	
7	M. ALI HAFIDZ	BPD	
8	Nastolen	BPD	
9	TOSRIKHA	Pemangkas	
10	Syaikhin	- - -	
11	H. ZAINI AB	- - -	
12	ZAMZAMI	- - -	
13	M. ALI RIDHO	- - -	
14	ARIS R	Kader Pemuda Hita	
15	Ali Hamid	Kader Pemuda	
16	Habiburrahman L	wiyata	
17	Ubeidillah	wiyata	

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA PURWOREJO KECAMATAN BONANG**



RIWAYAT HIDUP



Alfina Rosdiana adalah nama penulis skripsi ini. Penulis merupakan anak dari Bapak Suhirman dan Ibu Erma Hirzatul Warotsah sebagai anak kedua dari lima bersaudara. Penulis dilahirkan di Demak pada tanggal 1 April 2000. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD N Mutih Wetan (lulus tahun 2012), melanjutkan ke MTs I'anantuth Thullab (lulus tahun 2015), & MAN Demak (lulus tahun 2018) serta dapat

menempuh masa kuliah pada program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang .

Penulis juga aktif di dunia pergerakan dan organisasi. Dalam dunia pergerakan, penulis terlibat di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sementara pengalaman organisasi penulis ditingkat universitas didapatkan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, Walisongo Sport Club, dan Partai Mahasiswa Demokrat. Sedangkan pengalaman organisasi di luar kampus, penulis bergabung dalam organisasi Senyum Anak Nusantara Chapter Kabupaten Demak, Komunitas Juang PDI Perjuangan Kabupaten Demak, Komunitas Pemuda Kecamatan Wedung, Karang Taruna Desa, dan aktif sebagai penggerak literasi.

Atas izin Allah SWT, usaha dan disertai do'a kedua orang tua dalam menjalankan perkuliahan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo. Puji syukur penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul "Analisis Partisipasi Publik dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2021. Semoga tulisan ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi khalayak yang membacanya.